



2025

LAPORAN KINERJA

INTERIM

Triwulan I

**LOKA POM DI KABUPATEN
PULAU MOROTAI**

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan rahmat-Nya. Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 tahun 2025 tentang pedoman penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah di lingkungan badan pengawas obat dan makanan. Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 ini merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang Capaian Kinerja Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan. Perencanaan kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan penugasan dari Badan POM dan perencanaan penugasan usulan Loka POM Pulau Morotai berdasarkan kondisi lingkungan strategis Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai serta diselaraskan dengan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025.

Laporan Kinerja Interim disusun secara periodik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan disahkan oleh Kepala Badan POM. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan sarana evaluasi dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan (sustainable and continuing improvement) dalam rangka peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada tahun 2025.

Morotai, 30 April 2025



Salman Fariesy, S.Farm., Apt

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2025 – 2029 berdasarkan renstra Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai adalah:

1) Terwujudnya sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu, 2) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu, 3) Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM, 4) Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, 5) Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima.

Keberhasilan tujuan diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sebagaimana tercantum pada sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai. Hasil capaian tiap sasaran strategis pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sebesar 109,71. Dengan kriteria **Sangat Baik** menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada Triwulan I tahun 2025.
2. Pencapaian sasaran strategis Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sebesar 108,57 %. Dengan kriteria **Sangat Baik** menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada Triwulan I tahun 2025.
3. Pencapaian sasaran strategis meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di kabupaten Pulau Morotai sebesar 24,96 %. Dengan kriteria **Kurang** menunjukkan perlunya upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya.
4. Pencapaian sasaran strategis Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu Loka POM di kabupaten Pulau Morotai sebesar 109,76 %. Dengan kriteria **Sangat Baik** menunjukkan perlu adanya evaluasi kegiatan pada triwulan I tahun 2025 dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai.

5. Pencapaian sasaran strategis Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sebesar 0 % dengan kriteria **Kurang** menunjukkan perlunya upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya.
6. Pencapaian sasaran strategis Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di kabupaten Pulau Morotai sebesar 66,66% dengan kriteria **Cukup** menunjukkan perlunya upaya lebih agar Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dapat mencapai target pada triwulan selanjutnya.
7. Pencapaian sasaran strategis Layanan Publik Loka POM Di Kabupaten Pulau Morotai yang prima belum dapat diukur karena penilaian dilakukan pada akhir tahun 2025.
8. Pencapaian sasaran strategis Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal sebesar 100% Dengan kriteria **Baik** menunjukkan keberhasilan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada Triwulan I tahun 2025.

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada Triwulan I Tahun 2025 antara 0 % sampai dengan 109,76 %. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai” sebesar 0 % dengan kategori Kurang. Pada Bulan Maret telah dilakukan pengawasan, pengamatan dan penelitian di halmahera utara dan pada bulan April dilakukan pendalaman informasi terkait tindak lanjut informasi yang didapatkan sebelumnya tetapi masih belum mendapatkan target penindakan sehingga realisasi masih 0.

Capaian indikator kinerja “Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan”, “Jumlah desa pangan aman”, dan “Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas” dengan realisasi 0 % dengan kategori tidak dapat disimpulkan ini dikarenakan Belum dilakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dikarenakan bupati terpilih belum dilantik dan belum berada di Kab. Pulau Morotai sehingga pelaksanaan koordinasi awal tertunda sambil menunggu pelantikan dan tibanya Bupati di Kab. Pulau Morotai. Langkah yang ditempuh adalah menghubungi asisten pribadi Pulau Morotai guna untuk melakukan koordinasi awal pelaksanaan kegiatan Pro-PN. Dari hal diatas mengakibatkan tidak adanya realisasi kegiatan Forum Advokasi Pro-PN Keamanan Pangan s.d bulan Maret 2025.

Pada tahun 2024 Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai memperoleh anggaran sesuai DIPA awal Nomor SP DIPA 063.01.2.690462/2025 yang diterbitkan tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp. 3.516.261.000. Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.02.25.82 tanggal 4 Februari 2025 Revisi DJA dalam rangka Pemblokiran Mandiri Dalam Rangka Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA 2025. Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Melakukan Blokir anggaran sebanyak Rp.1.540.960.000 pada aplikasi SAKTI Kemenkeu. Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025 dalam rangka Revisi DJA dalam rangka Optimalisasi Anggaran Belanja Modal untuk Pemenuhan Honorarium PPNPN TA 2025 Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai mendapatkan penambahan anggaran sebanyak Rp. 33.310.000. Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025 Revisi DJA dalam rangka Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025. Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai mendapatkan relaksasi pemanfaatan blokir sebesar Rp. 427.366.000.

Realisasi anggaran pada Triwulan I tahun 2025 sebesar Rp 181.958.416,00 dari pagu sebesar Rp. 3.549.671.000 dengan persentase capaian sebesar 5,13 %. Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai melaksanakan 8 Sasaran strategis dengan pencapaian 7 (Sembilan) dengan kategori Tidak efisien, 1 (Sasaran) sasaran strategis tidak dapat dikategorikan karena belum terdapat realisasi.

Morotai, 30 April 2025



Salman Fariesy, S.Farm., Apt

HIGHLIGHT KINERJA

Pertahankan Prestasi, Loka POM di Kab. Pulau Morotai Kembali Raih Penghargaan dari KPPN Tobelo



Tobelo – Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai menghadiri Kegiatan Stakeholder's Day KPPN Tobelo 25 Januari 2024 dengan tema Membangun Kemitraan untuk Percepatan dan Optimalisasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024". Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 09.00 WIT di Aula KPPN Tobelo, dibuka dengan sambutan dari Kepala KPPN Tobelo, Bapak Toni. Pada kesempatan tersebut Loka POM di Kab. Pulau Morotai mendapatkan 3 penghargaan yaitu Peringkat III Satuan Kerja Dengan Transaksi KKP Terbesar, Peringkat III Satuan Kerja Dengan Transaksi Digipay Terbanyak, dan Peringkat I IKPA Terbaik untuk Satker Pagu Kecil (Sampai 5 Milyar).

Loka POM di Kab. Pulau Morotai Terima Penghargaan Realisasi Transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tertinggi Semester I Tahun 2024 Dari KPPN Tobelo



Tobelo – Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai menghadiri kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPPN Tobelo bertempat di Aula Kantor KPPN Tobelo pada Kamis (14/08/2024). Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Atik Purnomo. Dalam kesempatannya, Atik menyampaikan tujuan dari pelaksanaan kegiatan diantaranya sebagai upaya peningkatan kualitas layanan melalui pelibatan aktif publik (meaningful participation) dalam penyusunan maupun penyempurnaan standar pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). "Dalam forum ini diharapkan dapat terjadi dialog, diskusi, serta pertukaran opini secara partisipatif dengan publik yang bertujuan untuk menyelaraskan standar layanan KPPN dengan kebutuhan stakeholder," jelasnya.

Pada kegiatan ini, Loka POM di Kab. Pulau Morotai meraih penghargaan Peringkat 2 Realisasi Transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) tertinggi Semester I Tahun 2024 untuk satuan kerja lingkup KPPN Tobelo. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Loka POM di Kab. Pulau Morotai, Salman Fariesy.

Sertifikat Penghargaan Loka POM di Kab. Pulau Morotai Transaksi Digipay Terbanyak



Sertifikat SNI ISO 9001: 2015 Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan Quality Management System – Requirements



Penghargaan Satuan Kerja Dengan Transaksi KKP Terbanyak



DAFTAR ISI

Daftar Isi	v
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	1
1.3 Struktur Organisasi	3
1.4 Isu Strategis	4
1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan	4
2. Dinamika pasar yang cepat	5
3. Penerimaan Masyarakat Dan Industri Terhadap Kebijakan Nasional Obat dan Makanan	5
4. Akselerasi perkembangan teknologi	6
5. Perubahan demografi dan epidemiologi	7
6. Kebijakan Pemotongan Anggaran oleh Pemerintah Pusat	7
7. UMKM di Maluku Utara didominasi oleh usaha skala mikro dengan modal awal dan pendapatan rendah	8
8. Literasi Digital Masyarakat yang Rendah	9
BAB II	10
2.1 Uraian Singkat Renstra	10
2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN	13
2.3 Perjanjian Kinerja (PK)	15
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	17
2.5 Metode Pengukuran	21
BAB III	24
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	24
ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA	28
1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT	28
a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	28
b. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	38
c. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	41
d. Persentase Keputusan/ Rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	45
e. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	49

f. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	53
g. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	58
h. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.....	61
2. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	66
a. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	66
3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah Kerja UPT	69
a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	69
b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. 71	
c. Jumlah desa pangan aman.....	74
d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	76
4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.....	78
a. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	78
5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	82
a. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	82
6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	86
a. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	86
7. Layanan Publik UPT yang prima.....	89
a. Indeks Pelayanan Publik UPT	89
8. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.....	91
a. Nilai AKIP UPT BPOM	91
b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	94
c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM.....	96
d. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	97
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi.....	100
3.3 Realisasi Anggaran	115
BAB IV PENUTUP.....	136

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) pada tahun 2025-2029 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan isu sosial ekonomi nasional. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda Sustainable Development Goals (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan komoditi yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai secara efektif melaksanakan pengawasan premarket, postmarket, dan tindak lanjut dari hasil pengawasan; penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran hukum atas jaminan keamanan, manfaat, dan mutu Obat dan Makanan; peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan lebih mendekatkan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai ke masyarakat; serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Pada tanggal 9 Agustus 2017 telah disahkan Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Badan POM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan

Makanan. Perpres ini menegaskan, Badan POM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan,” bunyi Pasal 2 ayat (2).

Dengan adanya Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka pada tanggal 8 Juni 2018, diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Dalam Peraturan ini ditetapkan bahwa susunan organisasi BPOM terdiri dari:

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretaris Utama;
- c) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- d) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
- e) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
- f) Deputi Bidang Penindakan;
- g) Inspektorat Utama;
- h) Pusat; dan
- i) Unit Pelaksana Teknis

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT menyelenggarakan fungsi:

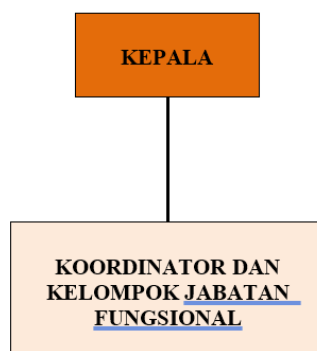
- a) Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- b) Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan.
- c) Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian.
- d) Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan.
- e) Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan.

- f) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan.
- g) Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- h) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- i) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- j) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- k) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- l) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan POM RI Nomor 3 Tahun 2025 Perubahan Atas Peraturan Badan POM RI Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan POM tanggal 8 Agustus 2023, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis dari 23 Unit Pelaksana Teknis Loka POM saat ini, yang tersebar di seluruh Indonesia.

Struktur organisasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dipimpin langsung oleh Kepala Loka. Adapun Kepala Loka membawahi pejabat fungsional seperti pada gambar struktur berikut:



Bagan 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

1.4 Isu Strategis

Beberapa Isu Strategis yang terjadi selama tahun 2025 antara lain:

1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap *platform e-commerce* berlomba-lomba untuk bertumbuh guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, pertumbuhan ini sering kali membawa risiko yang signifikan, seperti adanya potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan.

Kejahatan siber di bidang obat dan makanan melalui e-commerce menjadi tantangan serius dalam pengawasan produk yang beredar di masyarakat. Praktik ini melibatkan penjualan obat dan makanan ilegal secara daring, yang memanfaatkan kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan oleh platform online.

Salah satu masalah utama adalah kemudahan dalam pembuatan akun di marketplace, yang memungkinkan para penjual untuk memiliki lebih dari satu akun. Hal ini berarti bahwa jika satu akun berhasil ditindaklanjuti atau dihapus, mereka masih memiliki akun lain untuk melanjutkan aktivitas ilegal mereka.

Selain itu, sistem jual-beli online yang bersifat borderless membuatnya semakin sulit untuk memetakan dan mengawasi persebaran penjualan produk ilegal. Produk dapat dengan mudah berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa batasan geografis, sehingga menyulitkan pihak berwenang dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara BPOM, penyedia platform e-commerce, dan pihak berwenang lainnya untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efektif. Edukasi kepada

masyarakat juga sangat penting agar mereka dapat mengenali dan menghindari produk yang tidak aman dan ilegal. Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari kejahatan siber di bidang obat dan makanan.

2. Dinamika pasar yang cepat

Dinamika pasar yang cepat menjadi salah satu tantangan utama bagi industri obat dan makanan. Perubahan tren konsumen, inovasi teknologi, dan regulasi yang terus berkembang mempengaruhi cara produk dipasarkan dan didistribusikan. Dalam konteks ini, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai harus mampu beradaptasi dengan cepat untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap produk yang beredar tetap efektif.

Perubahan preferensi konsumen, seperti meningkatnya permintaan akan produk yang sehat dan alami, mendorong produsen untuk berinovasi dan memperkenalkan produk baru. Selain itu, kemajuan teknologi, terutama dalam e-commerce, telah mengubah cara konsumen berbelanja, membuat produk lebih mudah diakses. Namun, hal ini juga membuka peluang bagi peredaran produk ilegal yang tidak terjamin keamanannya.

Dalam menghadapi dinamika pasar yang cepat, Loka POM perlu meningkatkan kapasitas pengawasan dan responsif terhadap perubahan. Ini termasuk memperkuat kerjasama dengan pemangku kepentingan, melakukan edukasi kepada masyarakat, dan menerapkan teknologi dalam pengawasan. Dengan demikian, Loka POM dapat memastikan bahwa produk yang beredar di pasar tidak hanya memenuhi standar kualitas, tetapi juga aman bagi kesehatan masyarakat.

3. Penerimaan Masyarakat Dan Industri Terhadap Kebijakan Nasional Obat dan Makanan

Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa ancaman dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan ini. Salah satu ancaman utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tujuan dan manfaat dari kebijakan tersebut. Ketidakpahaman ini dapat menyebabkan skeptisisme dan resistensi terhadap regulasi yang ada.

Di sisi lain, industri juga dapat merasa tertekan oleh kebijakan yang dianggap terlalu ketat atau membebani. Jika regulasi dianggap tidak seimbang atau tidak mempertimbangkan kondisi pasar, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pelaku industri. Ancaman ini dapat mengakibatkan penolakan terhadap kebijakan, yang pada gilirannya dapat mengganggu upaya pengawasan dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Selain itu, adanya informasi yang salah atau hoaks mengenai kebijakan dapat memperburuk penerimaan masyarakat. Dalam era digital, penyebaran informasi yang cepat dapat menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan, sehingga penting bagi Loka POM dan BPOM untuk melakukan komunikasi yang efektif dan transparan.

Dengan memahami ancaman-ancaman ini, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk meningkatkan penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan, serta memastikan bahwa tujuan perlindungan kesehatan dapat tercapai secara optimal.

4. Akselerasi perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi yang akseleratif, khususnya dalam bidang bioteknologi dan nanoteknologi, menghadirkan sebuah paradigma baru dalam industri obat dan makanan yang secara fundamental dapat mengubah *landscape* pasar dan standar produk yang berlaku. Inovasi ini terkadang dapat bertentangan dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena produk baru sering kali mengandung komponen atau mekanisme kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Tantangan ini tidak hanya terletak pada aspek keamanan dan efikasi produk, tetapi juga pada kecepatan di mana BPOM harus bereaksi untuk memperbarui dan menyesuaikan regulasi dan metodologi pengujian untuk menjaga standar keamanan tanpa menghambat inovasi.

Ancaman yang dihadapi BPOM dalam konteks ini mencakup risiko keamanan publik akibat keterlambatan dalam merespons produk baru, potensi ketidakpastian di kalangan konsumen mengenai keamanan produk, dan kesulitan dalam memprediksi implikasi jangka panjang dari teknologi baru terhadap kesehatan dan keselamatan. Selain itu, kemampuan BPOM dalam memastikan kepatuhan industri terhadap regulasi baru menjadi semakin kompleks, mengingat sifat inovatif dari

produk yang mungkin memerlukan pendekatan pengawasan yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Ancaman ini memperjelas kebutuhan mendesak untuk sistem regulasi yang tidak hanya adaptif dan fleksibel tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan manfaat teknologi baru secara efektif dan efisien, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

5. Perubahan demografi dan epidemiologi

Perubahan demografi dan epidemiologi merupakan salah satu ancaman untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dinamika populasi, termasuk penambahan usia rata-rata, pertumbuhan populasi, dan pergeseran pola penyakit, secara signifikan mempengaruhi jenis dan jumlah produk obat serta makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, penuaan populasi (*ageing population*) dapat meningkatkan permintaan terhadap obat-obatan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan kronis, sedangkan perubahan pola penyakit, seperti meningkatnya prevalensi diabetes atau penyakit jantung, memerlukan penyesuaian dalam pengawasan produk makanan dan obat-obatan yang beredar di pasaran.

Perubahan demografi dan epidemiologi di Indonesia menghadirkan tantangan serius bagi kesehatan masyarakat. Kombinasi antara penambahan jumlah penduduk yang pesat dan transisi epidemiologis menciptakan situasi yang kompleks. Di satu sisi, terdapat peningkatan signifikan dalam penyakit tidak menular, seperti diabetes dan penyakit jantung, yang sering kali terkait dengan gaya hidup modern. Di sisi lain, penyakit menular, seperti tuberkulosis (TB), HIV-AIDS, dan malaria, masih menunjukkan angka prevalensi yang tinggi.

Kondisi ini menciptakan beban ganda bagi sistem kesehatan, di mana sumber daya yang terbatas harus dialokasikan untuk menangani berbagai jenis penyakit. Ancaman ini semakin diperparah oleh kurangnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan dan pengobatan penyakit, serta tantangan dalam akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas. Oleh karena itu, penting bagi Loka POM dan instansi terkait untuk berkolaborasi dalam merumuskan strategi yang efektif untuk mengatasi ancaman ini, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat terlindungi dari risiko kesehatan yang meningkat.

6. Kebijakan Pemotongan Anggaran oleh Pemerintah Pusat

Kebijakan pemotongan anggaran oleh Pemerintah Pusat menjadi ancaman serius bagi efektivitas Loka POM di Pulau Morotai dalam melaksanakan tugas

pengawasan obat dan makanan. Keterbatasan anggaran yang dialokasikan mengakibatkan berkurangnya cakupan pengawasan yang dapat dilakukan, sehingga menghambat kemampuan lembaga untuk memastikan keamanan dan kualitas produk yang beredar di masyarakat.

Dengan anggaran yang terbatas, Loka POM menghadapi kesulitan dalam melaksanakan berbagai program pengawasan, termasuk pengujian laboratorium, pelatihan sumber daya manusia, dan kegiatan komunikasi dengan masyarakat. Hal ini berpotensi meningkatkan risiko peredaran produk ilegal dan tidak aman, yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.

Kondisi ini menuntut Loka POM untuk berinovasi dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, namun tetap saja, pemotongan anggaran yang signifikan dapat mengurangi efektivitas pengawasan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini. Oleh karena itu, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk menyadari dampak dari kebijakan ini dan berupaya mencari solusi yang dapat mendukung keberlanjutan pengawasan obat dan makanan di Pulau Morotai.

7. UMKM di Maluku Utara didominasi oleh usaha skala mikro dengan modal awal dan pendapatan rendah

Di Maluku Utara, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didominasi oleh usaha skala mikro yang sering kali beroperasi dengan modal awal dan pendapatan yang rendah. Berdasarkan survei PaDi UMKM, terungkap bahwa 84% produk pangan olahan yang dihasilkan oleh UMKM belum memiliki izin edar dari BPOM.

Kendala utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam memperoleh izin edar ini terletak pada biaya perizinan yang tinggi dan minimnya pemahaman tentang proses registrasi. Hal ini menciptakan ancaman bagi keberlanjutan usaha mereka, karena produk yang tidak terdaftar berisiko tidak dapat bersaing di pasar yang semakin ketat. Selain itu, kurangnya izin edar juga dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap produk yang ditawarkan, sehingga berdampak negatif pada penjualan dan pertumbuhan usaha. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan dukungan dan edukasi kepada UMKM, agar mereka dapat memahami dan mengakses proses perizinan dengan lebih baik, serta meningkatkan daya saing produk mereka di pasar.

8. Literasi Digital Masyarakat yang Rendah

Tingkat penetrasi internet di Indonesia terus meningkat, namun kemampuan literasi digital masyarakat belum sejalan dengan perkembangan tersebut. Banyak individu yang belum memiliki keterampilan yang memadai untuk menilai dan memverifikasi informasi yang mereka terima. Hal ini menjadi ancaman serius, terutama dengan merebaknya informasi palsu atau berita hoax yang dapat menyesatkan publik.

Kondisi ini menyebabkan berbagai macam opini publik yang tidak berdasar, serta memicu kecemasan di kalangan masyarakat. Ketidakpahaman dalam membedakan informasi yang valid dan tidak valid dapat mengakibatkan keputusan yang salah, terutama dalam konteks kesehatan dan keselamatan. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi sangat penting untuk memberdayakan masyarakat dalam menghadapi tantangan informasi di era digital ini.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

Visi

Visi dan misi Pembangunan Nasional tahun 2025-2029 telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Februari 2025. Visi pembangunan Indonesia 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

RPJMN 2025-2029 merupakan fondasi awal tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Sejumlah transformasi dalam tahap pertama ini mencakup transformasi sosial; ekonomi; tata kelola; supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia; ketahanan sosial budaya dan ekologi; pembangunan wilayah dan sarana prasarana; serta kesinambungan pembangunan.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan berkualitas mencakup aspek:

Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman	:	Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
Sediaan Farmasi dan	:	BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini

Pangan Olahan Bermutu		mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:	:	BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
Masyarakat Sehat		Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat.

Tabel 1 Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan aman, bermutu, dan berdaya saing

Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2025-2029, antara lain:

- 1) Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa
- 2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
- 3) Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029,

mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

- 1) Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
- 2) Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
- 3) Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
- 4) Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik
- 5) Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kab. Pulau Morotai. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Loka POM di Kab. Pulau Morotai akan dapat mencapai sasaran strategis.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Untuk mewujudkan perencanaan yang selaras antara Renstra dengan penyusunan anggaran, maka sebelum penyusunan anggaran disusunlah Rencana Kerja Tahun (RKT) 2025 sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2025.

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	01 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01- Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		03- Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		04- Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persen
		05- Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		06- Persentase keputusan/ Rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100 Persen
		08- Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persen
		09- Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5 Persen
		10- Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen

		11- Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.33 Persen
2	03 Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01- Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai
3	04 Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah Kerja UPT	01- Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.44 Persen
		02- Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Nilai
		03- Jumlah desa pangan aman	1 Persen
		04- Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Persen
4	05 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01- Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persen
5	06 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01- Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90 Persen
6	07 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01- Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
7	08 Layanan Publik UPT yang prima	01- Indeks Pelayanan Publik UPT	4.05 Nilai
8	09 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit	02- Nilai AKIP UPT BPOM	79.7 Persen

		03- Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04- Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.913 Nilai
		05- Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persen

tabel. 2 Rencana Kerja Tahun 2025

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2025-2029 dan DIPA Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2025 dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3,549,671,000

Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2025 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai, sebagai berikut:

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	01 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	02- Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		07- Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		08- Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persen
		09- Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		10- Persentase keputusan/ Rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh	100 Persen

		stakeholder	
		12- Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persen
		13- Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5 Persen
		14- Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		15- Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.33 Persen
2	03 Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	02- Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai
3	04 Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah Kerja UPT	05- Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.44 Persen
		06- Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Nilai
		07- Jumlah desa pangan aman	1 Persen
		08- Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Persen
4	05 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	02- Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persen
5	06 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	02- Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90 Persen

6	07 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	06- Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
7	08 Layanan Publik UPT yang prima	01- Indeks Pelayanan Publik UPT	4.05 Nilai
8	09 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit	07- Nilai AKIP UPT BPOM	79.7 Persen
		08- Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		09- Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.913 Nilai
		10- Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persen

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Loka POM Morotai 2025

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2025 pada sasaran program disusun berdasarkan target pada Rencana Kinerja Tahun (RKT) tahun 2024.

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

RAPK dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi <https://simetris.esolution-tech.com/> pada menu *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikut. Namun terdapat perubahan/revisi terhadap RAPK khususnya pada tim fungsi pemeriksaan dan infokom. Pada fungsi pemeriksaan terdapat perbedaan cara hitung pada indikator Persentase UMKM pada manual IKU terbaru sehingga adanya selisih antara persentase tahapan target bulan Maret-November 2025, maka diperlukan penyesuaian target bulanan. Berdasarkan hal tersebut Usulan Perubahan target dapat, sedangkan pada fungsi infokom adanya Efisiensi Anggaran yang menyebabkan perubahan tahapan kegiatan, waktu

pelaksanaan, dan pembobotan pelaksanaan program maka diperlukan penyesuaian target bulanan. Berdasarkan hal tersebut Usulan Perubahan disepakati oleh Biro Perencanaan dan Keuangan dengan nomor surat B-PR.07.21.04.25.85 perihal Tanggapan terhadap Usulan Revisi Target RAPK tanggal 14 april 2025.

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	Target B3	Target B6	Target B9	Target B12	Anggaran
1	01 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	102,209,500
		03 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	58,005,000
		04 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	6,264,100
		05 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75	75	75	43,606,500
		06 Persentase keputusan/ Rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100	100	17,107,500
		08 Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang	90	90	90	90	33,231,600

		diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		09 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5	93.5	93.5	93.5	50,756,400
		10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	85	85	71,496,400
		11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.33	86.33	86.33	86.33	12,339,000
2	03 Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7	9	10	11	104,599,000
3	04 Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah Kerja UPT	01 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.44	85.44	85.44	85.44	142,699,000
		02 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15	71	93	2	99,410,000

		03 Jumlah desa pangan aman	15	70	93	1	171,938,000
		04 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	15	70	93	1	116,245,000
4	05 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	41	60	82	91	29,590,000
5	06 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	15	55	85	90	111,985,000
6	07 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	90	39,141,000
7	08 Layanan Publik UPT yang prima	01 Indeks Pelayanan Publik UPT				4.05	20,877,000
8	09 Terwujudnya tata kelola	02 Nilai AKIP UPT BPOM				79.7	20,020,000

	pemerintah Unit Organisasi yang optimal	03 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM				5	1,992,861, 000
		04 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM				2.913	
		05 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT					

Tabel 4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

2.5 Metode Pengukuran

Keberhasilan suatu sasaran strategis diukur melalui capaian indikator kinerja yang telah dituangkan pada Perjanjian Kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + (1 - \text{Realisasi}) / \text{Target} \times 100\%$$

Kategori penilaian capaian indikator kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Kategori	CAPAIAN IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	

Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	$= 100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$< 70\%$	

Tabel 5. Kategori Pencapaian Indikator

Capaian kinerja hasil perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	% CAPAIAN	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - < 100\%$ ($70 \leq x < 100$)	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $< 70\%$ ($x < 70$).	

Tabel 6. Pencapaian Indikator

Sedangkan untuk menghitung capaian sasaran strategis digunakan pembobotan untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 indikator. Berikut ini adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) :

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya (1).

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2}{2}$$

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3}{3}$$

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4}{4}$$

$$NPS_2 = \frac{1NPI_1 + 1NPI_2 + 1NPI_3 + 1NPI_4 + 1NPI_5}{5}$$

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target sudah tercapai.

Predikat kinerja organisasi baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria NPSS sesuai tabel berikut:

Kategori	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100%	
Baik	$90\% \leq x \leq 100\%$	
Butuh Perbaikan	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	<50%	

Tabel 7. Kategori Predikat kinerja organisasi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Sedangkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

SASARAN KEGIATAN		CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
SK1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	109,71	Sangat Baik
SK2	Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	108,57	Sangat Baik
SK3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing - masing wilayah Kerja UPT	24,96	Kurang
SK4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	109,76	Sangat Baik

SK5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	0	Kurang
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	66,66	Cukup
7	Layanan Publik UPT yang prima	-	-
8	Terwujudnya tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	100	Baik

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	(T)	(R)	(C)	Kategori
SK1	01 Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	83,33	104,16	
		03 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	75,71	100,95	
		04 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0	
		05 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	90	120	
		06 Persentase keputusan/ Rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100	
		08 Persentase sarana	90	0	0	

		produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
		09 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,5	0	0	
		10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	
		11 Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86,33	99,71	115,5	
SK2	02 Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7	7,6	108,57	
SK3	04 Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah Kerja UPT	01 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,44	85,29	99,82	
		02 Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15	0	0	
		03 Jumlah desa pangan aman	15	0	0	
		04 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	15	0	0	
SK4	05 Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan	01 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang	41	45	109,76	

	standar keamanan dan mutu	baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan				
SK5	06 Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	15	0	0	
6	07 Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	33,33	66,66	
7	08 Layanan Publik UPT yang prima	01 Indeks Pelayanan Publik UPT				
8	09 Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 Nilai AKIP UPT BPOM				
		03 Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM				
		04 Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM				
		05 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25	25	100	

Tabel 8. Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai Berdasarkan Indikator Kinerja

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

1. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

a. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan realisasi sebesar 104.16% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(A + B + C + D) / 4$.

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $a+b+c+d+e$ dimana

a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%)

$30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).

$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$

c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).

$20\% \times (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan} / \text{total jumlah sampel yang diuji} \times 100\%)$.

d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)

$20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$.

e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%)

$10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

a. Pemenuhan target pengawasan = $(a_1 + a_2) / 2$

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji) x 100%

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) x 100%

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e)/5

a. Pemenuhan target pengawasan =(a1 + a2) /2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan)
= (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) x 100%

c. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$
- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$
- D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$
2. Pemenuhan target pengawasan
- $(a1 + a2) / 2$
- $a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(*)} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$
- $a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$
3. Kesesuaian pelaksanaan sampling
- $(\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$.
4. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan
- $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}) \times 100\%$
5. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan
- $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai} / \text{Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan}) \times 100\%$
6. Tanggapan atas surat tindak lanjut
- $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktorat Pengawasan Kosmetik}) \times 100\%$

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
-------------------	--------	-----------	-----------	----------

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	83,33	104,16	 Sangat Baik
--	----	-------	--------	---

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target triwulan Target Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Kabupaten Pulau Morotai

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	83,33	104,16	 Tercapai

Tabel 10. Perbandingan Realisasi dengan Target Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Kabupaten Pulau Morotai

Sediaan farmasi yang dimaksud dalam indikator tersebut mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.

Realisasi persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan 1 Tahun 2025 yaitu sebesar 83.33% dari target yang ditetapkan 80%, sedangkan persen capaian sebesar 104,16% dengan kriteria "Sangat Baik" dikarenakan seluruh sampel Sediaan Farmasi TW I telah diterima oleh Balai Penguji. Jumlah realisasi sampel sediaan farmasi 12 dan telah sesuai dengan target yaitu sebanyak 12 sampel. Terhadap seluruh sampel telah dilakukan pengawasan penandaan/label (meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label) sesuai dengan pedoman. Untuk mempertahankan pemenuhan realisasi diatas pada triwulan berikutnya akan terus dilakukan upaya berkesinambungan yaitu pelaksanaan sampling dan pengujian sampel sesuai dengan pedoman dan perencanaan sampling tahun 2025

.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Keberhasilan :

- Koordinasi dengan Balai Penguji Regional dan Balai Koordinator terkait kemampuan pengujian dan waktu pengujian.
- Komunikasi yang dilakukan dengan Balai Penguji Regional dan Balai Koordinator melalui whatsapp group “Reg 6 Lab.BPOM”.
- Pemantauan pelaksanaan pengujian Sediaan Farmasi melalui SIPT secara rutin.

Kendala :

- Adanya efisiensi anggaran sehingga sampling dan pengujian terkendala karena biaya pengadaan sampel dan reagensia dan alat untuk menguji sampel yang terbatas.
- Terdapat 5 sampel pangan yang diuji tidak sesuai dengan parameter sesuai pedoman sampling

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Adanya dukungan dari Tim Keuangan sehingga anggaran dapat tersedia dan petugas dapat melaksanakan sampling sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
- Koordinasi antara Petugas sampling dengan tim penguji *Rapid Test* di Loka POM di Morotai sehingga pengujian bisa berlangsung dengan baik.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	Kondisi Akhir
	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat 1 sampel Suplemen Kesehatan yang belum selesai diuji untuk parameter uji mikrobiologi oleh Balai POM di Sofifi	Melakukan kegiatan sampling & pengujian sesuai dengan target yang telah direncanakan pada bulan berikutnya	April 2025	Melakukan koordinasi dengan Lab mikrobiologi Balai POM di Sofifi mengenai kendala tersebut	-	-	tercapainya target indikator pada tahun berjalan

		karena adanya keterbatasan alat sedangkan untuk perhitungan capaian indikator sampling Suplemen Kesehatan termasuk Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan sampling.							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 11. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal) Persentase Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA TAHUN 2025 (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait ketersediaan obat JKN serta Obat Program Kementerian Kesehatan dan obat program BKKBN
- Melakukan koordinasi dengan Laboratorium Penguji terkait proses pengujian sehingga sampel bisa dilaporkan dengan tepat waktu.

a. Persentase sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai ketentuan

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan realisasi sebesar 100.95% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

$$= 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$$

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

$A1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(*)} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$A2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

Catatan: Untuk UPT yang tidak melakukan pengujian hanya melakukan perhitungan A1

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan :

$(\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak} / \text{jumlah sampel yang diperiksa}) \times 100\%$

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya

Cara Perhitungan :

((Jumlah sampel yang ditindaklanjuti/ total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)) x 100%

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai ketentuan	75	75,71	100,95	 Sangat Baik

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target triwulan Target Persentase sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai ketentuan di Kabupaten Pulau Morotai

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai ketentuan	75	75,71	100,95	 Tercapai

Tabel 13. Perbandingan Realisasi dengan Target Persentase sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai ketentuan di Kabupaten Pulau Morotai

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Pelaksanaan sampling dan pengujian Pangan olahan tahun 2025 didasarkan pada sampling berbasis risiko. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.

Realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan 1 Tahun 2025 yaitu sebesar 75,71% dari target yang ditetapkan 75%, sehingga persen capaian sebesar 100,95% dengan kriteria **"Sangat Baik"**. Capaian ini diperoleh dari pelaksanaan rangkaian sampling dan pengujian pangan olahan Triwulan 1. Sampel Pangan Olahan TW I telah disampling, diperiksa, dan diterima oleh Balai Penguji. Jumlah realisasi sampel pangan olahan yaitu 7 sampel dan telah sesuai dengan target yaitu sebanyak 7 sampel. Terhadap seluruh sampel telah dilakukan pengawasan penandaan/label (meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label) sesuai dengan pedoman. Untuk mempertahankan pemenuhan realisasi diatas pada triwulan berikutnya akan terus dilakukan upaya berkesinambungan yaitu pelaksanaan sampling dan pengujian sampel sesuai dengan pedoman dan perencanaan sampling tahun 2025

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Keberhasilan :

- Tersedianya variasi sampel Pangan Olahan yang dapat disampling secara acak pada wilayah kerja Loka POM di Kab. Pulau Morotai
- Update kompetensi terkait mekanisme risk based sampling pangan olahan dan evaluasi label
- Komunikasi dengan balai koordinator untuk mengkoordinasikan proses pengujian dapat dilakukan sesuai dengan pedoman sampling serta kendala yang mungkin ada di dalam proses pelaksanaan pengujian.
- Pemantauan pelaksanaan pengujian Pangan Olahan melalui SIPT secara rutin.

Kendala :

- Adanya efisiensi anggaran sehingga sampling dan pengujian terkendala karena biaya pengadaan sampel dan reagensia dan alat untuk menguji sampel yang terbatas.
- Terdapat 5 sampel pangan yang diuji tidak sesuai dengan parameter sesuai pedoman sampling karena adanya efisiensi anggaran tuk pembelian reagensia.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Kegiatan pengambilan contoh produk yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman sampling
- Kegiatan pengawasan penandaan dan label yang telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dalam pedoman sampling
- Perencanaan dan pengelolaan anggaran yang baik sehingga anggaran dapat tersedia dan petugas dapat melaksanakan sampling sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	Kondisi Akhir
1	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Beberapa sampel pangan olahan ada yang diuji belum sesuai dengan PUK yang tertera pada Pedoman Sampling karena adanya efisiensi anggaran untuk pembelian reagensia, namun nilai kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling. Kendala terjadi karena UPT hanya mengirimkan sampel dan sulit	Melakukan kegiatan sampling & pengujian sesuai dengan target yang telah direncanakan pada bulan berikutnya	April 2025	Melakukan koordinasi dengan Lab Pangan Balai POM di Sofifi mengenai kendala tersebut.	-	-	tercapainya target indikator pada tahun berjalan

		memantau apakah Laboratorium Pengujian bisa melaksanakan seluruh PUK atau tidak.						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabel 14. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal) Persentase Persentase sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai ketentuan

UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA TAHUN 2025 (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

- Melaksanakan sampling sesuai dengan renlak
- Melakukan dengan koordinasi Laboratorium Pangan di Balai POM Sofifi maupun balai lainnya di regional 6 terkait kemampuan pengujian dan waktu pengujian sampel pangan.

b. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT” dengan realisasi sebesar 0% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\sum (30\% \times A_1, A_2, \dots, A_n) + (35\% \times B_1, B_2, \dots, B_n) + (35\% \times C_1, C_2, \dots, C_n)}{n}$$

A = jumlah parameter sampel yang diuji sesuai dengan hasil investigasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi x 100%

B = Jumlah parameter yang diuji sesuai dengan pedoman sampling/ total parameter uji dalam pedoman sampling x 100%

C = Jumlah parameter yang terkonfirmasi/ total parameter dugaan agen penyebab dari hasil investigasi terkonfirmasi x 100%

n = total sampel

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel KLB keracunan	100	0	0	Kurang

pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT				
---	--	--	--	--

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target triwulan Target Persentase Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT di Kabupaten Pulau Morotai

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0	 Perlu Upaya Keras

Tabel 16. Perbandingan Realisasi dengan Target Persentase Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT di Kabupaten Pulau Morotai

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, BPOM memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan/atau pengujian laboratorium terhadap sampel pangan untuk mendukung penentuan penyebab Keracunan Pangan. Penentuan penyebab KLB Keracunan Pangan ini disimpulkan berdasarkan hasil penyelidikan epidemiologi termasuk aspek sanitasi dan higiene dan hasil pengujian spesimen dan/atau sampel pangan. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L). Sampel KLB keracunan pangan yang diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait. Pada periode triwulan I Tahun 2025 ini tidak ada Kejadian Luar Biasa yang terjadi di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sehingga tidak ada sampel KLB keracunan pangan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Keberhasilan :

- Tidak ada Kejadian Luar Biasa yang terjadi di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai yaitu di Kabupaten Halmahera Utara maupun di Kabupaten Pulau Morotai itu sendiri.

Kendala :

- Indikator kinerja Persentase Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT merupakan indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2025 di Loka POM di Morotai sehingga Loka POM di Morotai masih belum memiliki pengalaman terkait pelaksanaan kegiatan. Arahan dari unit Pengampu yaitu Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan pada indikator tersebut.
- Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja Loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian, hal ini akan menjadi kendala karena Penyampling tidak mengetahui kondisi terkini terkait Laboratorium pengujian di Balai mengenai ketersediaan reagen, alat dan SDM yang kompeten untuk melakukan pengujian sampel KLB.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Keberhasilan penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) sangat bergantung pada serangkaian kegiatan yang saling mendukung, mulai dari deteksi dini, penyelidikan, hingga penanggulangan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi peningkatan kewaspadaan, surveilans, penyelidikan epidemiologi, dan penanggulangan yang tepat waktu dan efektif. Koordinasi dan sinergitas dibutuhkan antara Loka POM di Morotai dengan Pemerintah Daerah serta masyarakat.
- Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.04.25.124 Perihal Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) bahwa Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025 yaitu:
 - a. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.

- b. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- c. Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	Kondisi Akhir
	Persentase Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Tidak ada KLB pada bulan sebelumnya	Melakukan pengawasan KLB yang ada di wilayah pengawasan Arahan Pimpinan : Lakukan Pemantauan KLB secara berkala Koordinasi dengan dinas kesehatan terkait Tim Gerak Cepat KLB dan jalin komunikasi dengan baik	April 2025	Melakukan monitor kejadian KLB dan informasi KLB ada grup Tim KLB KP BPOM pada aplikasi whatsapp	-	-	Tidak ada KLB dan sampel KLB yang harus diuji sesuai standar

Tabel 17. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal) Persentase Persentase Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA TAHUN 2024 (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

- Koordinasi dengan Tim Gerak Cepat KLB KP yang ada di Daerah
- Koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan sebagai unit Pengampu pada Indikator Kinerja ini.

c. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan” dengan realisasi sebesar 120% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F

A. Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan :

$$(A1 + A2) / 2$$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*) / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

^(*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

^(**) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

D. Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel diambil di TW 1} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

E. Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan :

$$(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$$

F. Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.

Cara Perhitungan :

(Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti/Total jumlah sampel yang TMS)
x100%

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	90	120	 Sangat baik

Tabel 18. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target triwulan Target Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Kabupaten Pulau Morotai

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	90	120	 Tercapai

Tabel 19. Perbandingan Realisasi dengan Target Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Kabupaten Pulau Morotai

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Pelaksanaan sampling dan pengujian PIRT tahun 2025 didasarkan pada sampling berbasis risiko yaitu sampel dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling.

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya.

Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.

Realisasi persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan triwulan 1 Tahun 2025 yaitu sebesar 90% dari target yang ditetapkan 75%, sehingga persen capaian sebesar 120% dengan kriteria "Sangat Baik". Capaian ini diperoleh dari pelaksanaan rangkaian sampling dan pengujian PIRT Triwulan 1. Keseluruhan total sampel PIRT telah disampling pada Triwulan I

sesuai dengan ketentuan pada pedoman sampling, diperiksa, dan diterima oleh Balai Penguji. Jumlah realisasi sampel PIRT yaitu 5 sampel dan telah sesuai dengan target yaitu sebanyak 5 sampel. Terhadap seluruh sampel telah dilakukan pengawasan penandaan/label (meliputi pengecekan nomor izin edar, kedaluwarsa, kondisi kemasan, penandaan/label) sesuai dengan pedoman. Untuk mempertahankan pemenuhan realisasi diatas pada triwulan berikutnya akan terus dilakukan upaya berkesinambungan yaitu pelaksanaan sampling dan pengujian sampel sesuai dengan pedoman dan perencanaan sampling tahun 2025

.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Keberhasilan :

- Tersedianya variasi sampel PIRT yang dapat disampling sesuai dengan kategori pada wilayah kerja Loka POM di Kab. Pulau Morotai
- Update kompetensi terkait mekanisme risk based sampling dan evaluasi label
- Komunikasi dengan balai koordinator untuk mengkoordinasikan proses pengujian dapat dilakukan sesuai dengan pedoman sampling serta kendala yang mungkin ada di dalam proses pelaksanaan pengujian.
- Pemantauan pelaksanaan pengujian Pangan Olahan melalui SIPT secara rutin.

Kendala :

- Parameter penilaian ketepatan pelaporan pengujian sampel PIRT tidak tercapai karena Sampel PIRT belum selesai dilakukan pengujian diakibatkan keterbatasan alat di Laboratorium Balai POM Sofifi

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Kegiatan pengambilan contoh produk dilaksanakan dengan berpedoman pada pedoman sampling
- Kegiatan pengawasan penandaan dan label yang telah dilakukan sesuai dengan mekanisme dalam pedoman sampling
- Perencanaan dan pengelolaan anggaran yang baik sehingga anggaran dapat tersedia dan petugas dapat melaksanakan sampling sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	Kondisi Akhir
1.	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampel PIRT belum selesai dilakukan pengujian karena adanya keterbatasan alat di Laboratorium Balai POM Sofifi	Mengirimkan surat monev sampling & pengujian ke Balai POM Sofifi	April 2025	Melakukan koordinasi dengan Lab Pangan Balai POM di Sofifi Arahan Pimpinan	-	-	

Tabel 20. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA TAHUN 2024 (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

- Melaksanakan sampling sesuai dengan renlak
- Melakukan dengan koordinasi dengan Laboratorium pangan di Balai POM Sofifi maupun balai lainnya di regional 6 terkait kemampuan pengujian dan waktu pengujian sampel.

d. Persentase Keputusan/ Rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase Keputusan/ Rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder” berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

A = (jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha/jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha) $\times$ 100%

B = (jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor) $\times$ 100%

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keputusan/ Rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100	 Sangat Baik

Tabel 21. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target triwulan Target Persentase Keputusan/ Rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di Kabupaten Pulau Morotai

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keputusan/ Rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100	 Tercapai

Tabel 22. Perbandingan Realisasi dengan Target Persentase Keputusan/ Rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di Kabupaten Pulau Morotai

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Realisasi persentase Keputusan/ Rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder triwulan 1

Tahun 2025 yaitu sebesar 100% dari target yang ditetapkan 100%, sedangkan persen capaian sebesar 100% dengan kriteria "Sangat Baik" dikarenakan seluruh rekomendasi hasil pengawasan baik sediaan farmasi maupun pangan olahan yang diterbitkan oleh UPT telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh pelaku usaha maupun lintas sektor. Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha telah terlaksana melalui penerbitan 11 rekomendasi yang oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai. Dari 11 rekomendasi tersebut, keseluruhan rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh pelaku usaha, sehingga persentase realisasi tindak lanjut yang dilaksanakan sebesar 100%, sedangkan untuk Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor terdapat 2 jumlah rekomendasi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dan 2 rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh lintas sektor sehingga persentase realisasi yang diperoleh sebesar 100%. Adapun capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada Triwulan I tahun 2025 sebesar 100% dan masuk dalam kategori "Sangat Baik".

.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Keberhasilan :

- .Adanya komunikasi yang baik antara petugas Loka POM di Kab. Pulau Morotai dengan pelaku usaha maupun lintas sektor
- Melakukan follow up kepada pelaku usaha dan lintas sektor yang belum menyelesaikan CAPA
- Melakukan pendampingan kepada Pelaku Usaha dan Lintas Sektor yang mengalami kesulitan dalam penyelesaian CAPA

Kendala :

- Letak sarana yang berada di wilayah Kabupaten Halmahera Utara yang terpisah oleh lautan membutuhkan waktu dan biaya untuk melakukan kunjungan langsung

- Kurangnya akses internet pada sarana menyebabkan komunikasi melalui telepon genggam tidak maksimal

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Melakukan kunjungan langsung kepada sarana untuk dilakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan
- Melakukan monitoring CAPA pada rapat bulanan internal fungsi pemeriksaan dan rapat pemantauan kinerja bulanan Loka POM di Kab. Pulau Morotai

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timelin e	Progres Rencana Aksi			
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Rencana aksi yang belum selesai	Timelin e	Kondisi Akhir
5	Persentase Keputusan/ Rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Keputusan / rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diterbitkan dibulan sebelumnya masih dalam proses untuk ditindaklanjuti oleh stakeholder	Melakukan monitoring tindak lanjut berupa feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Loka POM di Morotai secara rutin setiap bulannya Arahan Pimpinan : Pahami DO	April 2025	Melakukan monitoring dan follow up terkait proses tindakan perbaikan yang dilakukan oleh stakeholder	-	-	tercapainya target indikator pada tahun berjalan

			dengan Baik. Pastikan semua Petugas memnuhi Kualifikasi yang dibutuhkan. Konsultasikan setiap permasalahan dilapangan dengan deputi pengampu					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

Tabel 23. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal) Persentase Persentase Keputusan/ Rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA TAHUN 2025 (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

- Monitoring CAPA dilakukan oleh petugas yang bertanggungjawab terhadap masing-masing komoditi

e. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

% Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

$$= \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.

Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek $(a+b+c/3)$ yaitu:

1. ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 05 pada bulan berikutnya;

2. kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
3. kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
 - 1.pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka grading sebagai A (MK)
 - 2.pemeriksaan C atau pemeriks level III maka grading sebagai B (TMK)
 - 3.pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka grading sebagai C (TMK)
4. kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Kordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat/FGD, advokasi.

Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut
2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	0	0	 Kurang

Tabel 24. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target triwulan Target Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Kabupaten Pulau Morotai

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	0	0	 Perlu Upaya Keras

Tabel 25. Perbandingan Realisasi dengan Target Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Kabupaten Pulau Morotai

Pelaksanaan Pengawasan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan telah dilaksanakan pada bulan Februari 2025 sebanyak 2 sarana, namun perhitungan realisasi tidak bisa dilakukan pada indikator ini karena belum ada kesepakatan dari unit pengampu yang ada di Deputi III Badan POM hingga tanggal 31 Maret 2025 sehingga perhitungan realisasi akan dilakukan pengecualian pada periode triwulan I Tahun 2025.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Keberhasilan :

- Tersedianya inspektur pangan tingkat dasar dan muda dalam melakukan pengawasan pemeriksaan sarana produksi

Kendala :

- Adanya kebijakan efisiensi anggaran sehingga perlu dilakukan perubahan strategi dan rencana pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi
- Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.04.25.124 Perihal Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
- Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025 yaitu:
 - a. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.
 - b. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
 - c. Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- Ketiga indikator tersebut belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I dan selanjutnya akan dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance.

- Ketiga indikator tersebut tetap dicantumkan dalam pembahasan pada Laporan Kinerja Interim (BAB III) dengan mencantumkan justifikasi seperti pada poin nomor
- Perhitungan NKO pada Laporan Kinerja Interim dilakukan secara manual oleh masing-masing UPT mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan BPOM dengan pengecualian terhadap ketiga indikator pada poin nomor 1.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- .Melakukan koordinasi dengan lintas sektor dalam pengawasan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	Kondisi Akhir
6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Renlak Kegiatan Pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan Tahun 2025 belum disusun pada awal tahun	Menyusun Renlak Kegiatan Pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan Tahun 2025 Arahan Pimpinan: Pahami DO dengan Baik. Pastikan semua Petugas memenuhi Kualifikasi yang dibutuhkan. Konsultasikan setiap	Januari 2025	Melaksanakan akan kegiatan pemeriksaan sarana produksi yang di fokuskan pada sarana MD pada TW I	-	-	tercapainya target indikator pada tahun berjalan

			permasalahan n dilapangan dengan deputi pengampu.					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

Tabel 26. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA TAHUN 2025 (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

- Melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat dalam melakukan pengawasan sarana produksi pangan olahan
- Melakukan pengembangan kompetensi petugas terkait pemeriksaan sarana produksi pangan olahan

f. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = $(A+B+C)/3$

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindak Lanjut (b)

(a) Pemenuhan Target Pemeriksaan

Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh $UPT = (A/B)$

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan ditambah dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada periode tahun berjalan x 100%

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan ditambah dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa pada tahun berjalan

(b) Kesesuaian Tindak Lanjut

Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100%

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%
- b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

= Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target pengawasan sesuai renlak) X 100%.
- b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%.

- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%.
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5%	0*	0%*	 Kurang

Tabel 27. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target triwulan Target Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Kabupaten Pulau Morotai

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5%	0*	0%*	 Perlu Upaya Keras

Tabel 28. Perbandingan Realisasi dengan Target Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Kabupaten Pulau Morotai

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;

- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi. Pelaksanaan Pengawasan pada fasilitas distribusi Sediaan Farmasi telah dilaksanakan sejak bulan Januari 2025 dan sudah dilakukan pengawasan sebanyak 8 sarana yaitu 3 sarana pelayanan kefarmasian dan 5 sarana distribusi kosmetik, namun perhitungan realisasi tidak bisa dilakukan pada indikator ini karena belum ada kesepakatan dari unit pengampu yang ada di Deputi I & Deputi II Badan POM hingga tanggal 31 Maret 2025 sehingga perhitungan realisasi akan dilakukan pengecualian pada periode triwulan I Tahun 2025.

.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Keberhasilan :

- Menjalin koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah Kab. Pulau Morotai dan Kab. Halmahera Utara untuk menjalankan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan secara terpadu.

Kendala :

- Adanya kebijakan efisiensi anggaran pada bulan Februari 2025 menyebabkan terjadi nya perubahan strategi pelaksanaan pengawasan Sarana Distribusi sediaan farmasi. Pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi kosmetik dilaksanakan bersamaan dengan Aksi Kosmetik yang diselenggarakan oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik pada Bulan Februari 2025.
- Belum ada perhitungan indikator yang ditetapkan oleh unit pengampu yang ada di Deputi I & Deputi II Badan POM hingga tanggal 31 Maret 2025 sehingga perhitungan realisasi akan dilakukan pengecualian pada periode triwulan I Tahun 2025
- Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.04.25.124 Perihal Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025 yaitu:
 - a. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.

- b. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- c. Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- Ketiga indikator tersebut belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I dan selanjutnya akan dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance.
- Ketiga indikator tersebut tetap dicantumkan dalam pembahasan pada Laporan Kinerja Interim (BAB III) dengan mencantumkan justifikasi seperti pada poin nomor
- Perhitungan NKO pada Laporan Kinerja Interim dilakukan secara manual oleh masing-masing UPT mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan BPOM dengan pengecualian terhadap ketiga indikator pada poin nomor 1.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan analisis resiko meliputi hasil pemeriksaan sebelumnya, kategori temuan, periode pemeriksaan dan lain-lain sehingga didapatkan pembobotan sarana yang menjadi prioritas untuk dilakukan pemeriksaan..
- Kerjasama antar tim Pemeriksaan yang baik sehingga pada pelaksanaan tidak ditemukan kendala.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	Kondisi Akhir
	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanj	Renlak Kegiatan Pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi Tahun 2025 belum disusun	Menyusun Renlak Kegiatan Pemeriksaan distribusi Sediaan Farmasi Tahun 2025 Arahan Pimpinan:	Januari 2025	Melaksanakan akan Pemeriks aan distribusi Sediaan Farmasi sesuai dengan renlak yang	-	-	tercapainya target indikator pada tahun berjalan

	uti sesuai ketentuan		Pahami DO dengan Baik Pastikan semua Petugas memenuhi Kualifikasi yang dibutuhkan. Konsultasikan setiap permasalahan dilapangan dengan deputi pengampu		telah disusun			
--	----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--

Tabel 29. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal) Persentase Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA TAHUN 2025 (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

- Pengembangan kompetensi yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam rangka pemeriksaan sarana distribusi diantaranya Bimbingan Teknis Inspektur CDOB Junior, Forum Komunikasi ONPP, Forum Komunikasi Inspektur Kosmetik dan Forum Komunikasi Inspektur OTSK

g. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan” berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

Persentase sarana distribusi pangan olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai ketentuan = A+B+C

$A = 20\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa} / \text{target jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$ (catatan: pending sesuai akumulasi renlak atau pakai tahunan?)

$B = 70\% \times ((\text{Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

$C = 10\% \times ((\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah sarana yang diperiksa}) \times 100\%)$

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	 Sangat Baik

Tabel 30. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target triwulan Target Persentase Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Kabupaten Pulau Morotai

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	 Tercapai

Tabel 31. Perbandingan Realisasi dengan Target Persentase Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan di Kabupaten Pulau Morotai

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Sarana diperiksa melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sarana diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Pada triwulan 1 tahun 2025, bulan Januari s/d Maret telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap sarana distribusi pangan olahan sebanyak 7 sarana. Dari total jumlah sarana yang diperiksa, diperoleh hasil pemeriksaan sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 5 sarana, sementara sarana distribusi yang memenuhi ketentuan sebanyak 2 sarana. Pengawasan telah dilakukan

berdasarkan pedoman pengawasan dan pemberian tindak lanjut kepada sarana mengacu pada pedoman tindak lanjut pengawasan sarana distribusi

.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Keberhasilan :

- .Melaksanakan pemeriksaan sarana distribusi dengan berpedoman pada pedoman pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan
- Melaksanakan pelaporan hasil pengawasan secara tepat waktu dengan memperhatikan ketepatan pengambilan kesimpulan dan pola tindak lanjut sesuai dengan pedoman pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan
- Melakukan komunikasi yang intens dengan Pelaku Usaha sehingga tindakan perbaikan hasil pelaksanaan bisa dilaporkan secara tepat waktu.

Kendala :

- Masih ada Pelaku Usaha yang belum memahami mengenai keamanan pangan serta resiko yang bisa menyebabkan kerusakan pangan.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Pengembangan kompetensi yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam rangka pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan diantaranya Bimbingan Teknis Inspektur Pangan Junior.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	Kondisi Akhir
	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan dilakukan berdasarkan renlak kegiatan, namun ada efisiensi anggaran pada bulan Februari 2025 dan relaksasi bulan Maret 2025	Melakukan penyusunan ulang renlak kegiatan Arahan Pimpinan : Pahami DO dengan Baik Pastikan semua Petugas memenuhi Kualifikasi yang dibutuhkan. Konsultasikan setiap permasalahan	Juni 2025	Melakukan kegiatan pengawasan menggunakan renlak kegiatan awal tahun sebelum efisiensi	-	-	tercapai n target indikator pada tahun berjalan

			dilapangan dengan deputi pengampu					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

Tabel 32. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal) Persentase Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA TAHUN 2025 (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

- Edukasi/KIE terkait Cara Peredaran Pangan yang Baik (CPerPOB) kepada Pelaku Usaha disertai dengan pemberian pemahaman terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai peredaran pangan Olaha.

h. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan” berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $\frac{a+b}{2}$

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai Renlak}} \times 100\%$$

b. Ketepatan waktu pelaporan

$$= \frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi/ jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak) X100%

Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang selesai diawasi}) \times 100\%$

Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}) \times 100\%$

Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang selesai diawasi}) \times 100\%$

Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$

D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$

a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target} / \text{jumlah media (4)}$

– Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $(\text{capaian jumlah iklan per media} / \text{jumlah target per media}) \times 100\%$

Keterangan : capaian per media tidak lebih dari sama dengan 100%

b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = $(\text{Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT} + \text{Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat}) / 2$

– Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = $(\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$

– Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$

E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)

Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi/ jumlah target iklan sesuai renlak) X 40%

Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = Rata-rata dari perhitungan ((jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media)X 20%

Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

Catatan: poin a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86,33	99,71	115,5	 Sangat Baik

Tabel 33. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target triwulan Target Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan di Kabupaten Pulau Morotai

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86,33	99,71	115,5	 Tercapai

Tabel 34. Perbandingan Realisasi dengan Target Persentase Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan di Kabupaten Pulau Morotai

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta *timeline* yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media.

Realisasi persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan triwulan 1 Tahun 2025 yaitu sebesar 99,71% dari target yang ditetapkan 86,33%, sedangkan persen capaian sebesar 115,5% dengan kriteria "Sangat Baik" dikarenakan telah dilakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai rencana pelaksanaan, surat edaran dari masing-masing ke deputian, dan sesuai dengan pedoman pengawasan iklan. Pada Triwulan I Tahun 2025 telah dilakukan pengawasan terhadap iklan obat sebanyak 6 iklan, iklan Obat Tradisional sebanyak 3 iklan, iklan Suplemen Kesehatan sebanyak 4 iklan, iklan Kosmetik sebanyak 30 iklan, dan iklan Pangan sebanyak 21 iklan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Keberhasilan :

- Petugas telah mengikuti pengembangan kompetensi terkait cara pengawasan iklan pada masing-masing ke deputian

Kendala :

- Surat edaran dari masing-masing ke deputian baru terbit pada akhir bulan Januari dan bulan Maret sehingga pengawasan iklan baru dilaksanakan di bulan Februari dan Maret

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- . Melakukan koordinasi dengan unit pengampu pada masing-masing ke deputian

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	Kondisi Akhir
9	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pengawasan iklan dilakukan berdasarkan tren aktivitas	Melakukan kegiatan pengawasan iklan sesuai dengan target yang telah direncanakan pada bulan berikutnya Arahan Pimpinan : Pahami DO dengan Baik. Pastikan semua Petugas memenuhi Kualifikasi yang dibutuhkan. Konsultasikan setiap permasalahan dilapangan dengan deputy pengampu	April 2025	Melakukan pengawasan iklan sesuai dengan pedoman	-	-	tercapai target indikator pada tahun berjalan

Tabel 35. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA TAHUN 2025 (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

- Melakukan monitoring terhadap hasil pengawasan iklan yang telah dilakukan melalui surat edaran dari masing-masing kedeputian atau melalui SIPT untuk pengawasan berikutnya yang lebih baik

2. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

a. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM.

SKL untuk tingkat 2 dan 1 adalah Standar Ruang Lingkup (RL), Standar Peralatan dan, Standar kompetensi laboratorium. Digunakan untuk menilai kemampuan laboratorium UPT yang masuk tingkat 2 dan 1 dalam melakukan fungsi pengujian sampel obat dan makanan untuk pengujian dasar kimia dan mikrobiologi.

Cara hitung SKL tingkat 2 dan 1:

- a. Nilai pemenuhan SRL tingkat 2 dan 1 POM = (rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia + nilai pemenuhan SRL mikrobiologi)/2
- b. Rata-rata nilai pemenuhan SRL kimia = (nilai pemenuhan SRL obat + nilai pemenuhan SRL obat tradisional/ obat kuasi/suplemen kesehatan+ nilai pemenuhan SRL kosmetik+ nilai pemenuhan SRL pangan)/4
- c. nilai pemenuhan Standar Peralatan tingkat 2 dan 1 = (nilai pemenuhan standar Peralatan kimia + nilai pemenuhan standar mikrobiologi)/2
- d. nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium LOKA POM = (nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium kimia + nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium mikrobiologi)/2

Cara Perhitungan:

Nilai pemenuhan SKL tingkat 2 dan 1 = (75 % x Nilai pemenuhan SRL LOKA POM) + (15% x Nilai pemenuhan standar peralatan LOKA POM) + (10% x nilai pemenuhan standar kompetensi laboratorium tingkat 2 dan 1)

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Pemenuhan Pengujian Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar	7	7.6	108.57%	 Sangat Baik

Tabel 36. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target triwulan Target pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Obat yang memenuhi syarat	7	7.6	108.75%	 Tercapai

Tabel 37. Perbandingan Realisasi dengan Target Persentase pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Keberhasilan :

- Loka POM di Kab. Pulau Morotai telah memiliki baseline Standar Kemampuan Laboratorium tingkat I. Dimana Alat laboratorium pada 2024 masuk sebagai baseline 2024 pada perhitungan Standar Kemampuan Laboratorium tingkat I untuk loka (Nilai Pemenuhan Standar Peralatan Kimia). Selain itu, juga telah dilaksanakan pengujian 4 zat aktif obat dengan rapid test obat pada Tahun 2024. Hal tersebut masuk sebagai baseline 2024 pada perhitungan Standar Kemampuan Laboratorium tingkat I untuk loka (Nilai Standar Ruang Lingkup Pangan).
- Terdapat permintaan pengujian pangan (*Food Security*) pada Triwulan I, hal ini membantu tercapainya Standar Kemampuan Laboratorium Loka POM di Kab. Pulau Morotai pada Komponen Standar Ruang Lingkup Pangan.

Kendala :

- Pada triwulan Terdapat Kebijakan terkait Efisiensi anggaran berdasarkan pada Surat B-PR.05.03.2.02.25.101 tentang Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025 sehingga belum semua bahan penunjang laboratorium dapat diadakan/direalisasikan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Pengembangan kompetensi untuk tim pengujian yang dilaksanakan secara daring oleh PPPOMN yaitu Pelatihan Verifikasi Metode Kualitatif dan Kuantitatif Mikrobiologi pada Pangan dan Bimbingan teknis Pengembangan Kompetensi Penguji Kimia Laboratorium Tingkat 1 dan Tingkat 2 BPOM. Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan pada Triwulan I tersebut dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	Kondisi Akhir
	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Loka POM di Kab. Pulau Morotai belum melakukan pengujian rapid test obat pada Triwulan I	1. Melakukan Pengujian sesuai dengan Perencanaan Pengujian Rapid Test Obat Tahun 2025 2. Berkoordinasi dengan Tim Pemeriksaan terkait Sampel Obat yang dapat diuji sesuai dengan Kemampuan Laboratorium Loka POM di Kab. Pulau Morotai Arahan Pimpinan Pelajari DO dengan baik prioritaskan pada peningkatan nilai SKL dengan penggunaan Sumber Daya yang Minimal. Rencanakan Pengadaan reagent yang dibutuhkan	April	Tim Pengujian melakukan diskusi dengan Ketua Tim Pemeriksa an terkait sampel obat yang dapat diuji sesuai dengan kemampuan Laboratorium Loka POM di Kab. Morotai	Melakukan Pengujian sesuai dengan Perencanaan Pengujian Rapid Test Obat Tahun 2025 Arahan Pimpinan	April	Loka POM di Kab. Pulau Morotai melakukan pengujian rapid test obat pada Triwulan berikutnya

			bagi bany parameter uji.					
--	--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

Tabel 38. pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sesuai SKL merupakan IK baru untuk Loka POM di Kab. Pulau Morotai, sehingga belum terdapat tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya.

UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA TAHUN 2024 (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing masing wilayah Kerja UPT

a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.

Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

- 1) Sumber atau Narasumber KIE
- 2) Konten atau Informasi KIE
- 3) Pemahaman Audiens KIE
- 4) Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

Survei dilakukan secara daring (online) dengan memberikan tautan survei yang terhubung dengan aplikasi BPOM (<https://lookerstudio.google.com/reporting/c3480b06-b8e4-47e7-ba55>)

835c5f39adca/page/WdQcE) untuk menghitung nilai hasil survei (khusus untuk TW I).

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.44	85.29	99.82	 Cukup

Tabel 39. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target triwulan Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT di Kabupaten Pulau Morotai

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.44	85.29	99.82	 Akan tercapai

Tabel 40. Perbandingan Realisasi dengan Target Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT di Kabupaten Pulau Morotai

Selama Triwulan I Tahun 2025, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan 2 (dua) kali Kegiatan KIE yaitu KIE SINEMATIKA dalam rangka HUT BPOM dengan tema “Ayo Cek Produkmu Bersama BPOM” sebanyak 10 orang dan KIE SINEMATIKA dalam Rangka Hut Badan Powell Pramuka dengan tema “Pastikan Panganmu Aman Melalui 5 Kunci Keamanan Pangan” dengan peserta 30 orang. Pelaksanaan kegiatan KIE dilakukan secara offline dengan pemberian materi kepada masyarakat umum dan siswa/siswi SMPN 20 Pulau Morotai. Berdasarkan hasil perhitungan Survei, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai mendapatkan nilai 85.29 dimana capaian tersebut belum mencapai target dengan capaian sebesar 99.82%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Keberhasilan : -

Kendala :

- 1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan di ruangan terbuka dengan sarana dan prasarana yang minim seperti meja dan kursi pelayanan publik khusus untuk pelaksanaan KIE di luar ruangan.

- 2) Jumlah total target responden KIE adalah 158 orang. Untuk TW I, jumlah responden 40 orang. Pengukuran nilai Indeks Efektivitas KIE TW I belum mewakili untuk jumlah total responden dengan sifat target yang akumulatif (belum menggambarkan keseluruhan target).

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Presentasi Implementasi Reformasi Birokrasi yang konsisten dilaksanakan sebagai upaya menjaga semangat melayani petugas Loka POM di Kab. Pulau Morotai yang diaktualisasikan dengan kegiatan Inovasi SINEMATIKA yang dikemas dalam kegiatan KIE kepada masyarakat dan anak sekolah.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	Kondisi Akhir
	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai indeks efektivitas belum mencapai target	Akan melaksanakan dengan memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan responden	Juni 2025	Melakukan perencanaan pelaksanaan KIE dengan mencari tempat yang proper untuk KIE selanjutnya. Melaksanakan KIE dengan memperhatikan Juknis Pusat, lokus stunting.	Melaksanakan KIE Pramuka di bulan Mei-Juni untuk meningkatkan nilai Indeks Efektivitas KIE karena penilaian indikator bersifat akumulatif.	Juni	Nilai Indeks Efektivitas KIE mencapai target

Tabel 41. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA TAHUN 2024 (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

- Akan melakukan KIE dengan rutin setiap triwulan agar dapat memenuhi jumlah minimal responden sehingga dapat meningkatkan nilai.

b. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.

Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.

Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:

- 1) Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
- 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sekolah Full Intervensi:
- 2) advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 - a) Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 - b) Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
 - c) Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
 - d) Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi
 - e) Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2024

INDIKATOR KINER.	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15	0	0	 Kurang

Tabel 42. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target triwulan Target Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Kabupaten Pulau Morotai

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINER.	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
------------------	--------	-----------	-----------	----------

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	0	0	 Perlu Upaya Keras)
---	---	---	---	--

Tabel 43. Perbandingan Realisasi dengan Target Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan di Kabupaten Pulau Morotai

.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Keberhasilan : - .

Kendala : Pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait sudah dilakukan s.d bulan Maret, tetapi karena adanya cuti bersama yang panjang, maka pelaksanaan kegiatan Advokasi dilaksanakan di bulan April (batas akhir pelaksanaan advokasi).

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program atau kegiatan strategis yang Loka POM di Kab. Pulau Morotai laksanakan khususnya untuk kegiatan PJAS ini yaitu melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait yang lebih intensif dan melibatkan pejabat pemangku kepentingan dalam setiap tahapan kegiatan terutama kepala sekolah dan guru sekolah yang sekolahnya di intervensi serta pertukaran informasi terkait jadwal kegiatan sekolah seperti permintaan kalender pendidikan di dinas pendidikan terkait agar tidak ada kendala dalam proses pelaksanaan kegiatan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	Kondisi Akhir
	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Belum dilakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan	Akan melaksanakan kegiatan Forum Advokasi Pro-PN di bulan April	April 2025	-	Menghubungi asisten pribadi bupati pulau morotai untuk menentukan tanggal koordinasi	April 2024	Telah dilakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan

Tabel 44. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal) Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA TAHUN 2024 (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

- Melakukan koordinasi dengan asisten Bupati Pulau Morotai agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik
- Loka POM di Kab. Pulau Morotai akan terus meningkatkan koordinasi dan bersinergis dengan lintas sektor terkait agar program kami bisa direplikasi dan dinilai penting untuk masyarakat khususnya masyarakat di kab. Pulau Morotai.

c. Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2024

INDIKATOR KINER.	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Desa Pangan Aman	15	0	0	 Kurang

Tabel 45. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target triwulan Target Desa Pangan Aman di Kabupaten Pulau Morotai

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Desa Pangan Aman	1	0	0	 Perlu Upaya Keras

Tabel 46. Perbandingan Realisasi dengan Target Desa Pangan Aman di Kabupaten Pulau Morotai

.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Keberhasilan : -

Kendala : Pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait sudah dilakukan s.d bulan Maret, tetapi karena adanya cuti bersama yang panjang, maka pelaksanaan kegiatan Advokasi dilaksanakan di bulan April (batas akhir pelaksanaan advokasi).

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Program desa pangan aman akan diintegrasikan dengan program lintas sektor lain seperti program penanganan stunting dan pemberian makanan tambahan lokal kepada balita (KIE) agar dapat berdampak besar kepada desa Nakamura (desa stunting)
- Keragaman pemilihan kader yang berasal dari masyarakat, Ibu PKK, kader posyandu/gizi, kader remaja putra/putri, dan kader pembangunan manusia membentuk keterwakilan dari masyarakat sehingga diharapkan bisa memberikan edukasi kepada komunitasnya.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	Kondisi Akhir
	Desa Pangan Aman	Belum dilakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan	Akan melaksanakan kegiatan For Advokasi Pro-PN bulan April	April 2025	-	Menghubungkan asisten pribadi bupati pulau morotai untuk menentukan tanggal koordinasi	April 2024	Telah dilakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan

Tabel 47. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal)Desa Pangan Aman

UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA TAHUN 2024 (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

- Melakukan koordinasi dengan asisten Bupati Pulau Morotai agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik
- Loka POM di Kab. Pulau Morotai akan terus meningkatkan koordinasi dan bersinergis dengan lintas sektor terkait agar program kami bisa direplikasi dan dinilai penting untuk masyarakat khususnya masyarakat di kab. Pulau Morotai.

d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.

Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dan *demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawasan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat.

Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawasan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *demand* dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	15	0	0	 Kurang

Tabel 48. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target triwulan Target Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	0	0	 Perlu Upaya Keras

Tabel 49. Perbandingan Realisasi dengan Target Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Kabupaten Pulau Morotai

.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Keberhasilan : -

Kendala : Pelaksanaan koordinasi dengan dinas terkait sudah dilakukan s.d bulan Maret, tetapi karena adanya cuti bersama yang panjang, maka pelaksanaan kegiatan Advokasi dilaksanakan di bulan April (batas akhir pelaksanaan advokasi).

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Program pasar pangan aman berbasis komunitas akan diintegrasikan dengan program lintas sektor lain seperti program dari Disperindagkop dan UKM agar dapat berdampak besar kepada komunitas pasar dan pengunjung pasar.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi
----	-----------	--------------	-------------	----------	----------------------

					Rencana a yang suc Selesai**	Rencana a yang bel selesai	Timeline	Kondisi Ak
	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Belum dilakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan	Akan melaksanakan kegiatan Forum Advokasi Pro-PN di bulan April	April 2025	-	Menghubungi asisten pribadi bupati pulau morotai untuk menentukan tanggal koordinasi	April 2024	Telah dilakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan

Tabel 50. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal) Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA TAHUN 2024 (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

- Melakukan koordinasi dengan asisten Bupati Pulau Morotai agar pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan baik
- Loka POM di Kab. Pulau Morotai akan terus meningkatkan koordinasi dan bersinergis dengan lintas sektor terkait agar program kami bisa direplikasi dan dinilai penting untuk masyarakat khususnya masyarakat di kab. Pulau Morotai.

4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

a. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai telah melakukan penilaian kinerja pada indikator kinerja “Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan” dengan realisasi sebesar 109,76% berdasarkan rumusan perhitungan sebagai berikut:

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB = (A + B + C)/3

$$A = \frac{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang memperoleh IP-CPPOB}}{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{jumlah rekomendasi sertifikat CPOTB Bertahap}}{\text{jumlah UMKM OBA yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah rekomendasi SPA CPKB}}{\text{jumlah UMKM Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

Catatan: Jumlah UMKM yang didampingi minimal sesuai target pada DIPA Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai tidak mempunyai target UMKM OBA dan Kosmetik yang didampingi pada tahun 2025. Target yang diberikan adalah untuk UMKM Pangan yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat IP CPPOB.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINER.	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	41	45	109,76	 Sangat Baik

Tabel 51. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target triwulan Target Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan di Kabupaten Pulau Morotai

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

INDIKATOR KINER.	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	41	45	109,76	 Tercapai

Tabel 52. Perbandingan Realisasi dengan Target Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan di Kabupaten Pulau Morotai

UMKM yang memenuhi standar adalah UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi. UMK Pangan Olahan yang memenuhi standar adalah UMK yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK.

UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan yaitu Keputusan Kepala Badan POM Nomor 82 Tahun 2022. Capaian UMK yang didampingi dihitung berdasarkan UMK

yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama tahun berjalan. Adapun tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan, Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitas Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan. Perhitungan kinerja berdasarkan penyelesaian tahapan proses sebagai berikut.

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	KIE/Sosialisasi Keamanan Pangan	Januari - Maret	5	Setiap UPT melakukan KIE/Sosialisasi KP. Metode secara luring atau daring (webinar) atau hybrid disesuaikan dengan sumber daya. Bukti dukung: daftar hadir, nilai pre post test dan foto kegiatan
2	Penetapan UMK pangan olahan target	Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Bimtek CPPOB	Maret – April	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB	April – Okt	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Monev dan Pelaporan	Nov – Des	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev akhir dilaksanakan Nov-Des. Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

Tabel 53. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target triwulan Target Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan di Kabupaten Pulau Morotai

Realisasi Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan triwulan 1 Tahun 2025 yaitu sebesar 45% dari target yang ditetapkan sebesar 41%, dan persen capaian sebesar 109,76% dengan kriteria “ Sangat Baik”. Realisasi ini diperoleh karena telah terselesaikannya 3 tahapan pendampingan UMKM yaitu Sosialisasi/KIE Keamanan Pangan, Penetapan UMK pangan olahan target, dan pelaksanaan Bimtek CPPOB bagi pelaku usaha UMK Pangan Olahan.

.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Keberhasilan :

- Pendampingan terhadap UMKM dijalankan melalui Inovasi Ladang Pala dengan strategi jemput bola kepada pelaku usaha pangan olahan.
- Terdapat fasilitator pangan yang mendampingi pelaku usaha dalam proses memperoleh IP CPPOB hingga nomor izin edar melalui pemberian bimbingan dan konsultasi secara tatap muka maupun online (whatsapp, zoom meeting) dengan pendekatan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha
- Pelaku usaha yang di dampingi berkomitmen untuk mengikuti setiap tahapan pendampingan dan bersedia menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik pada proses produksinya.

Kendala :

- Salah satu sarana/UMK pangan olahan target pendampingan mengalami kendala internal untuk melakukan proses resertifikasi SNI. SNI yang dimiliki sudah berakhir masa berlaku per 25 Februari 2025. Pendampingan IP CPPOB akan dilakukan menunggu hingga pengurusan SNI selesai dan SPPT SNI yang baru terbit.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Petugas pendamping / fasilitator mengikuti kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh BPOM Pusat untuk meningkatkan kompetensi dalam mendampingi pelaku usaha/UMK pangan dalam menerapkan standar keamanan dan mutu produksinya dan memenuhi persyaratan UMKM yang memenuhi standar.
- Penyebaran informasi tentang Inovasi Ladang Pala pada acara KIE, bimtek, rapat lintas sektor, maupun pertemuan lainnya yang dimaksudkan untuk menarik minat pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi proses produksi dan registrasi produknya di BPOM.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	Kondisi Akhir
1.	Persentase UMKM yang	SNI PT. Intim Karya sudah habis	Melakukan pendampingan UMKM sesuai	April 2025	Melakukan Bimtek CPPOB	-	-	tercapainya target indikator

didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	di bulan Februari 2025 sehingga pendampingan IP CPPOB akan dimulai ketika pengurusan SNI selesai dan SPPT SNI terbit	dengan target yang telah direncanakan pada bulan berikutnya		sesuai dengan pedoman			pada tahun berjalan
--	--	---	--	-----------------------	--	--	---------------------

Tabel 54. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal) Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA TAHUN 2025 (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

- Melakukan tahapan pendampingan UMKM dengan berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

a. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

= ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan hardcopy. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

= ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

Perkara dengan tersangka yang sudah ditetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan atau laporan kemajuan penyidikan *hardcopy*.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	5	0	0	 Kurang

Tabel 55. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target triwulan Target Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90	0	0	 Perlu Upaya Keras

Tabel 56. Perbandingan Realisasi dengan Target Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Petugas fungsi penindakan telah melakukan investigasi dan pendalaman informasi terhadap sediaan farmasi yang di edarkan tanpa izin edar yang ada di kabupaten pulau morotai. Kemudian petugas juga melakukan melakukan pengawasan di kabupaten halmahera utara untuk mendapatkan informasi kasus kejahatan obat dan makanan yang terjadi di kabupaten halmahera utara. Sampai saat ini belum ada Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang diterbitkan oleh Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sehingga capaian Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan masih 0%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan.

Kendala :

1. Kondisi geografis morotai yang tidak terlalu besar dan sudah 3 tahun berturut turut mendapatkan kasus diwilayah tersebut.
2. Letak wilayah kabupaten Halmahera utara terpisah pulau dengan kantor Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk melakukan pemantauan diwilayah tersebut.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

1. Melakukan kegiatan intelijen lebih banyak lagi agar dapat memberikan gambaran kejahatan yang terjadi di wilayah kerja Loka POM di Pulau Morotai
2. Melakukan pendalaman informasi terhadap informasi awal yang telah di terima

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	Kondisi Akhir
1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Belum ada SPDP yang diterbitkan	1. Melakukan kegiatan intelijen lebih banyak lagi agar dapat memberikan gambaran kejahatan yang terjadi di wilayah kerja Loka POM di Pulau Morotai 2. Melakukan pendalaman informasi terhadap informasi awal yang telah di terima	Juni	Melakukan pendalaman terhadap informasi yang terdapat sebelumnya	Melakukan lebih banyak kegiatan intelijen	Juni	Menerbitkan SPDP

			Arahan Pimpinan					
			Laksanakan Investigasi Awal dan penyelidikan untuk terkait potensi perkara di wilayah kab. morotai dan halmahera utara.					

Tabel 57. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA TAHUN 2025 (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

Melakukan pendalaman terhadap informasi yang telah didapatkan sebelumnya

6. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

a. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor

HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :

Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap tahun).

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)

Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:

Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu tahun.

Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25)

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINER.	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	33,33	66,66	 Kurang

Tabel 58. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target triwulan Target Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	100	33,33	33,33	 Perlu Upaya Keras

Tabel 59.. Perbandingan Realisasi dengan Target Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Petugas melakukan patroli siber dan profiling siber selama bulan Januari hingga Maret sebanyak 6 laporan, 2 dari 6 laporan tersebut dilaporkan tidak tepat waktu hal ini disebabkan karena batas waktu sebelumnya di tanggal 25 Maret 2025 dimajukan ke tanggal 21 Maret 2025 karena libur lebaran sehingga petugas yang melaporkan di tanggal 24 Maret 2025 tidak dikategorikan tepat waktu sehingga capaian Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar sebesar 33,33%.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Kendala :

Indikator tersebut masih baru sehingga petugas butuh pembiasaan terhadap indikator tersebut. Sebelumnya pelaporan patroli siber dan profiling ditetapkan sebelum tanggal 30 kemudian ditetapkan tanggal 25 tetapi dapat dimajukan karena libur lebaran ke tanggal 21.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Perlu membuat link spreadsheet untuk memonitoring pelaporan agar tepat waktu

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	Kondisi Akhir
	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi	Laporan Profiling	Melakukan penetapan deadline	Juni	Melaporkan Laporan Profiling	Melaporkan pengawasan siber dan	Juni	Laporan profiling

	dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	terlambat dilaporkan	bagi petugas yaitu tanggal 15 bulan berjalan agar dapat memonitoring capaian pelaporan Arahan Pimpinan : Lakukan Cyber Patrol dan Profiling dilakukan dengan tepat waktu		sebelum batas pelaporan	profiling sebelum tanggal bulan berjalan Arahan Pimpinan Lakukan Cyber Patrol dan Profiling dilakukan dengan tepat waktu		dilaporkan tepat waktu
--	--	----------------------	--	--	-------------------------	--	--	------------------------

Tabel 59. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA TAHUN 2024 (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

- Melaporkan pengawasan siber dan profiling sebelum tanggal 15 bulan berjalan

7. Layanan Publik UPT yang prima

a. Indeks Pelayanan Publik UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 24%);
- 2) Profesionalitas SDM (25%);
- 3) Sarana Prasarana (18%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (10%);

6) Inovasi (12%).

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPP BPOM mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).

IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi. Nilai Indeks Pelayanan Publik: 75% Nilai Indeks F02 + 25% Nilai Indeks F03

Kategori nilai:

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target triwulan Target Indeks Pelayanan Publik UPT

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Pelayanan Publik UPT	4.05	-	-	-

Tabel 60. Perbandingan Realisasi dengan Target Indeks Pelayanan Publik UPT

.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Keberhasilan :

- .

Kendala :

-

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

-

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	Kondisi Akhir

Tabel 61. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal) Target Indeks Pelayanan Publik UPT

UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA TAHUN 2024 (REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)

-

8. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

a. Nilai AKIP UPT BPOM

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

- (1) Perencanaan Kinerja;
- (2) Pengukuran Kinerja;
- (3) Pelaporan Kinerja;
- (4) Evaluasi Kinerja Internal;
- (5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Tabel 62. Bobot Komponen AKIP

Predikat nilai AKIP terdiri dari

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai

			kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D		Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

Tabel 63. Predikat Nilai AKIP

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-

Tabel 64. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target triwulan Nilai AKIP UPT BPOM

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai AKIP UPT BPOM	79	-	-	-

Tabel 65. Perbandingan Realisasi dengan Target Nilai AKIP UPT BPOM

Belum ada realisasi pada indikator ini karena hasil pengukuran AKIP di akhir tahun 2025.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025 LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	Kondisi Akhir

Tabel 66. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal) Target Nilai AKIP UPT BPOM

b. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)

Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Nilai Kinerja Anggaran =

(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Tabel 67. Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-

Tabel 68. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target triwulan Target Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	-	-	-

Tabel 69. Perbandingan Realisasi dengan Target Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Keberhasilan :

- Nilai pengukuran indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM di akhir tahun 2025

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	Kondisi Akhir

Tabel 70. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal) Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

-

c. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM.

Manajemen Risiko dilakukan oleh UPT dengan mengidentifikasi risiko dari setiap fungsi ke dalam tabel risiko untuk berikutnya dilakukan tindakan mitigasi terhadap risiko yang perlu dimitigasi. Selain dari pada itu, UPT dari tiap fungsi juga mendokumentasi risiko positif yang telah dijalankan untuk mendukung kinerja dari UPT maupun dari tiap fungsi.

Penyampaian pelaporan dilakukan dengan input dokumen manajemen risiko melalui Aplikasi SAPA APIP pada menu Manrisk II dengan rincian:

- a. Piagam
- b. Konteks
- c. Daftar Risiko
- d. Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
- e. Aktivitas Pengendalian
- f. Risiko Positif

Target dari Manajemen Risiko merupakan target tahunan sehingga perhitungan/penilaian target tidak dilakukan setiap triwulan, namun perhitungan/penilaian target dilakukan dalam periode tahunan oleh Inspektoral.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-

Tabel 71. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target triwulan Target Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM di Kabupaten Pulau Morotai

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,913			

Tabel 72. Perbandingan Realisasi dengan Target Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM di Kabupaten Pulau Morotai

Belum ada realisasi pada indikator ini, karena realisasi Indeks Manajemen Risiko ada diakhir tahun 2025.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	Kondisi Akhir

Tabel 73. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM di Kabupaten Pulau Morotai

d. Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi adalah upaya sistematis dan terencana yang dilakukan UPT untuk memperbaiki kinerja birokrasi agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tujuan dari Reformasi Birokrasi adalah mewujudkan tata kelola pemerintah UPT yang baik dengan Apratur Negara yang berintegritas tinggi, produktif dan memberikan layanan publik yang prima.

Langkah UPT dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi yaitu melalui pembentukan tim Reformasi Birokrasi yang dibagi dalam setiap Bidang yaitu :

1. Bidang Manajemen Perubahan
2. Bidang Penguatan Sistem Pengawasan
3. Bidang Pelayanan Publik
4. Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja
5. Bidang Penguatan Penataan Tata Laksana
6. Bidang Penguatan Sumber Daya Manusia

Tim pelaksana selain sebagaimana disebutkan di atas, juga mempunyai tugas untuk:

- a. Melaksanakan koordinasi, kerja sama, dan fasilitas kepada semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

- b. Melakukan internalisasi dan sosialisasi kepada pegawai dan masyarakat tentang Reformasi Birokrasi di lingkungan Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai
- c. Mengikutsertakan dan/atau bekerja sama dengan para pakar pemangku kepentingan
- d. Melaporkan perkembangan hasil kerjanya kepada Ketua Tim Pelaksana paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan
- e. Menyiapkan data dan dokumen pendukung sebagai bahan penilaian PMPRB bagi Tim Asesor PMPRB.

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Triwulan I Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25%	25%	100%	 Baik

Tabel 74. Perbandingan Realisasi Triwulan I dengan Target triwulan Target Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I dengan Target Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KATEGORI
Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100%	25%	25%	 Perlu Upaya Keras

Tabel 75. Perbandingan Realisasi dengan Target Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi atau upaya nyata yang telah dilakukan

Keberhasilan :

- .Kerja sama yang baik dari setiap Bidang dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan rencana Reformasi Birokrasi yang telah disusun dan diselesaikan/dilaporkan sesuai dengan timeline yang telah ditentukan bersama.

Kendala :

- Fleksibilitas waktu dari masing-masing pegawai yang terbentur dengan kegiatan dari tugas utama fungsi yang perlu diprioritaskan untuk mencapai target dari tugas utama fungsi.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Monitoring terhadap kegiatan inovasi RB sebagai media dalam mencapai target Implementasi Reformasi Birokrasi UPT.
- Pembagian timeline dan pelaporan yang lebih fleksibel untuk mempermudah PIC kegiatan inovasi RB dalam melaporkan kegiatannya.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			
					Rencana aksi yang sudah Selesai**	Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	Kondisi Akhir
1.	Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Monitoring kegiatan inovasi bulan Februari 2025	Dilakukan monitoring kegiatan inovasi RB yang telah direncanakan untuk triwulan berikutnya	April 2025	Melakukan monitoring untuk kegiatan inovasi di TW I 2025	-	April 2025	Persentase implementasi Reformasi Birokrasi tahun 2025 tercapai

Tabel 76. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun Eksternal) Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT

**UPAYA PERBAIKAN DAN PENYEMPURNAAN KINERJA TAHUN 2025
(REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA)**

Melaporkan kegiatan inovasi RB Tahun 2025 sesuai dengan pembagian timeline pada perencanaan kegiatan Inovasi RB Tahun 2025 (Bulanan, Triwulanan dan Tahunan).

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Terdapat 1 sampel Suplemen Kesehatan yang belum selesai diuji untuk parameter uji mikrobiologi oleh Balai POM di Sofifi karena adanya keterbatasan alat sedangkan untuk perhitungan capaian indikator sampling Suplemen Kesehatan termasuk Kelangka	Melakukan kegiatan sampling & pengujian sesuai dengan target yang telah direncanakan pada bulan berikutnya Arahan Pimpinan Pahami DO dengan Baik Pastikan semua parameter uji dapat diuji oleh balai penguji sebelum disampling. lakukan monitoring untuk memastikan sample selesai diuji tepat waktu	April 2025	Melakukan koordinasi dengan Lab mikrobiologi Balai POM di Sofifi mengenai kendala tersebut Arahan Pimpinan Evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian tw I dan identifikasi akar permasalahannya dan laporkan permasalahannya.	-	-	tercapainya target indikator pada tahun berjalan

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		pan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan kinerja UPT yang melakukan n sampling.						
2	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	beberapa sampel pangan olahan ada yang diuji belum sesuai dengan PUK yang tertera pada Pedoman Sampling karena adanya efisiensi anggaran	Melakukan kegiatan sampling & pengujian sesuai dengan target yang telah direncanakan pada bulan berikutnya Arahan Pimpinan Pimpinan Pahami DO dengan Baik Pastikan semua parameter uji dapat diuji	April 2025	Melakukan koordinasi dengan Lab Pangan Balai POM di Sofifi mengenai kendala tersebut. Arahan Pimpinan : Evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian tw I dan identifikasi akar permasalahannya dan laporkan permasalahannya.	-	-	tercapainya target indikator pada tahun berjalan

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		tuk pembelian reagensia, namun nilai kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling. Kendala terjadi karena UPT hanya mengirimkan sampel dan sulit memantau apakah Laboratorium Penguji bisa melaksanakan seluruh PUK atau tidak.	oleh balai penguji sebelum disampling. lakukan monitoring untuk memastikan sample selesai diuji tepat waktu					

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Persentase Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	Tidak ada KLB pada bulan sebelumnya	Melakukan pengawasan KLB yang ada di wilayah pengawasan Arahan Pimpinan : Lakukan Pemantauan KLB secara berkala Koordinasi dengan dinas kesehatan terkait Tim Gerak Cepat KLB dan jalin komunikasi dengan baik	April 2025	Melakukan monitor kejadian KLB dan informasi KLB ada grup Tim KLB KP BPOM pada aplikasi whatsapp	-	-	Tidak ada KLB dan sampel KLB yang harus diuji sesuai standar
4	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampel PIRT belum selesai dilakukan pengujian karena adanya keterbatasan alat di Laboratorium Balai POM Sofifi	Mengirimkan surat monev sampling & pengujian ke Balai POM Sofifi Arahan Pimpinan : Pimpin Pahami DO dengan Baik Pastikan semua parameter uji dapat diuji oleh balai penguii	April 2025	Melakukan koordinasi dengan Lab Pangan Balai POM di Sofifi Arahan Pimpinan : Evaluasi pelaksanaan sampling dan pengujian tw I dan identifikasi akar permasalahannya dan laporkan permasalahannya.	-	-	tercapainya target indikator pada tahun berjalan

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			sebelum disampling. lakukan monitoring untuk memastikan sample selesai diuji tepat waktu					
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diterbitkan sebelum masih dalam proses untuk ditindaklanjuti oleh stakeholder	Melakukan monitoring tindak lanjut berupa feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Loka POM di Morotai secara rutin setiap bulannya Arahan Pimpinan : Pimpinan Pahami DO dengan Baik Pastikan semua Petugas memnuhi	April 2025	Melakukan monitoring dan followup terkait proses tindakan perbaikan yang dilakukan oleh stakeholder	-	-	tercapai nya target indikator pada tahun berjalan

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kualifikasi yang dibutuhkan. Konsultasikan setiap permasalahan di lapangan dengan deputi pengampu					
6	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Renlak Kegiatan Pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan Tahun 2025 belum disusun ada awal tahun	Menyusun Renlak Kegiatan Pemeriksaan sarana produksi Pangan Olahan Tahun 2025 Arahan Pimpinan : Pimpinan : Pimpinan Pahami DO dengan Baik Pastikan semua Petugas memenuhi Kualifikasi yang dibutuhkan. Konsultasikan setiap permasalahan di lapangan dengan	Januari 2025	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi yang di fokuskan pada sarana MD pada TW I	-	-	tercapainya target indikator pada tahun berjalan

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			deputi pengampu					
7	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Renlak Kegiatan Pemeriksaan sarana distribusi Sediaan Farmasi Tahun 2025 belum disusun	Menyusun Renlak Kegiatan Pemeriksaan distribusi Sediaan Farmasi Tahun 2025 Arahan Pimpinan : Pimpinan Pahami DO dengan Baik Pastikan semua Petugas memenuhi Kualifikasi yang dibutuhkan. Konsultasikan setiap permasalahan di lapangan dengan deputi pengampu	Januari 2025	Melaksanakan Pemeriksaan distribusi Sediaan Farmasi sesuai dengan renlak yang telah disusun	-	-	tercapainya target indikator pada tahun berjalan
8	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	Pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan dilakukan berdasarkan	Melakukan penyusunan ulang renlak kegiatan Arahan Pimpinan : Pimpinan	Juni 2025	Melakukan kegiatan pengawasan menggunakan renlak kegiatan awal tahun sebelum efisiensi	-	-	tercapainya target indikator pada tahun berjalan

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	kan renlak kegiatan, namun ada efisiensi anggaran pada bulan Februari 225 dan relaksasi bulan Maret 2025	Pahami DO dengan Baik Pastikan semua Petugas memenuhi Kualifikasi yang dibutuhkan. Konsultasikan setiap permasalahan dilapangan dengan deputi pengampu					
9	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Pengawasan iklan dilakukan berdasarkan renlak kegiatan	Melakukan kegiatan pengawasan iklan sesuai dengan target yang telah direncanakan pada bulan berikutnya Arahan Pimpinan : Pimpinan Pahami DO dengan Baik Pastikan semua Petugas memenuhi Kualifikasi yang dibutuhkan.	April 2025	Melakukan pengawasan iklan sesuai dengan pedoman	-	-	tercapainya target indikator pada tahun berjalan

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Konsultasikan setiap permasalahan di lapangan dengan deputi pengampu					
10	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Loka POM di Kab. Pulau Morotai belum melakukan pengujian rapid test obat pada Triwulan I	1. Melakukan Pengujian sesuai dengan Perencanaan Pengujian Rapid Test Obat Tahun 2025 2. Berkoordinasi dengan Tim Pemeriksaan terkait Sampel Obat yang dapat diuji sesuai dengan Kemampuan Laboratorium Loka POM di Kab. Pulau Morotai Arahan Pimpinan	April	Tim Pengujian melakukan diskusi dengan Ketua Tim Pemeriksaan terkait sampel obat yang dapat diuji sesuai dengan kemampuan Laboratorium Loka POM di Kab. Morotai	Melakukan Pengujian sesuai dengan Perencanaan Pengujian Rapid Test Obat Tahun 2025 Arahan Pimpinan	April	Loka POM di Kab. Pulau Morotai melakukan pengujian rapid test obat pada Triwulan berikutnya

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pelajari DO dengan baik prioritaskan pada peningkatan nilai SKL dengan penggunaan Sumber Daya yang Minimal. Rencanakan Pengadaan reagen yang dibutuhkan bagi banyak parameter uji.					
11	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai indeks efektivitas KIE belum mencapai target	Akan melaksanakan KIE dengan memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan responden Arahan Pimpinan Lakukan KIE dengan memperhatikan perbedaan karakteristik, lakukan sesuai dengan juknis	Juni	Melakukan perencanaan pelaksanaan KIE dengan mencari tempat yang proper untuk KIE selanjutnya Melaksanakan KIE dengan memperhatikan Juknis Pusat, lokus stunting.	Melaksanakan KIE Pramuka di bulan Mei-Juni untuk meningkatkan nilai Indeks Efektivitas KIE karena penilaian indikator bersifat akumulatif. Arahan Pimpinan ; Fokus pada karakteristik customer dan lakukan pelaksanaan KIE dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.	Juni	Nilai Indeks Efektivitas KIE mencapai target

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Jumlah sekolah yang melaksakan akan pembudayaan keamanan pangan	Belum dilakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan	Akan melaksanakan kegiatan Forum Advokasi Pro-PN di bulan April Arahan Pimpinan : Target Advokasi di Bulan April, selanjutnya segera laksanakan program sesuai dengan tahapan yang ada dalam juknis.	April	-	Menghubungi asisten pribadi bupati pulau morotai untuk menentukan tanggal koordinasi Arahan Pimpinan : Laksanakan Advokasi sesuai dengan jadwal	April	Telah dilakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan
13	Jumlah desa pangan aman	Belum dilakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan	Akan melaksanakan kegiatan Forum Advokasi Pro-PN di bulan April Arahan Pimpinan : Target Advokasi di Bulan April, selanjutnya segera laksanakan program sesuai	April	-	Menghubungi asisten pribadi bupati pulau morotai untuk menentukan tanggal koordinasi Arahan Pimpinan : Laksanakan Advokasi sesuai dengan jadwal	April	Telah dilakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dengan tahapan yang ada dalam juknis.					
14	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Belum dilakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan	Akan melaksanakan kegiatan Forum Advokasi Pro-PN di bulan April Arahan Pimpinan : Target Advokasi di Bulan April, selanjutnya segera laksanakan program sesuai dengan tahapan yang ada dalam juknis.	April	-	Menghubungi asisten pribadi bupati pulau morotai untuk menentukan tanggal koordinasi Arahan Pimpinan : Laksanakan Advokasi sesuai dengan jadwal	April	Telah dilakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan
15	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara	kegiatan KIE belum dilakukan karena informasi KIE baru dimasukkan pada manual IKU yang disusun	Melakukan pendampingan UMKM sesuai dengan target yang telah direncanakan pada bulan berikutnya Arahan Pimpinan : Fokus pada customer.	April 2025	melakukan Bimtek CPPOB sesuai dengan pedoman	-	-	tercapai nya target indikator pada tahun berjalan

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	pembuat n OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	pada bulan Februari 2025	khususnya customer yang potensial dan diproyeksikan rutin berproduksi untuk dua tahun mendatang					
16	Persentas e Keberhasi lan Penyidika n Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Belum ada SPDP yang diterbitka n	1. Melakukan kegiatan intelijen lebih banyak lagi agar dapat memberikan gambaran kejahatan yang terjadi di wilayah kerja Loka POM di Pulau Morotai 2. Melakukan pendalaman informasi terhadap informasi awal yang telah di terima Arahan Pimpinan Laksanakan Investigasi Awal dan penyelidikan untuk terkait potensi	Juni	Melakukan pendalaman terhadap informasi yang telah didapatkan sebelumnya	Melakukan lebih banyak kegiatan intelijen	Jun	Menerbitkan SPDP

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			perkara di wilayah kab. morotai dan halmahera utara.					
17	Persentas e Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaik an sesuai standar	Laporan Profiling terlambat dilaporka n	Melakukan penetapan deadline bagi petugas yaitu tanggal 15 bulan berjalan agar dapat memonitoring capaian pelaporan Arahan Pimpinan : Lakukan Cyber Patrol dan Profiling dilakukan dengan tepat waktu	Juni	Melaporkan Laporan Profiling sebelum batas pelaporan	Melaporkan pengawasan siber dan profiling sebelum tanggal 15 Arahan Pimpinan : Lakukan Cyber Patrol dan Profiling dilakukan dengan tepat waktu	Juni	Laporan profiling dilaporkan tepat waktu
18	Indeks Pelayana n Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-
19	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-
20	Nilai Kinerja Anggaran	-	-	-	-	-	-	-

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

No	Indikator	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana aksi yang sudah selesai**	Belum***		
						Rencana aksi yang belum selesai	Timeline	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	UPT BPOM							
21	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-
22	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Telah dilakukan perencanaan kegiatan RB untuk tahun 2025	Melakukan kegiatan Inovasi RB sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam perencanaan Arahan Pimpinan	April 2025	Laporan kegiatan inovasi RB berupa : Kurma, Rohani, Jus Semangka, Narasi, WBS dan Ladang Pala	Laporan kegiatan inovasi RB untuk Laporan Bulanan dan Triwulanan di TW II tahun 2025 Arahan Pimpinan	Juli 2025	Kegiatan inovasi RB berjalan sesuai perencanaan

3.3 Realisasi Anggaran

- a. Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja (realisasi kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran).**

Rencana penarikan dana Loka POM di Kab. Pulau Morotai tahun 2025 periode Januari s/d Maret adalah Rp. 45.053.686 untuk belanja pegawai, Rp. 253.781.683 untuk belanja barang, dan Rp. 0 untuk belanja modal (Bulan Januari). Pada bulan Februari adalah sebesar Rp. 51.937.685 untuk belanja pegawai, Rp. 92.784.370 untuk belanja barang dan Rp. 0 untuk belanja modal. Sedangkan untuk bulan maret, rencana penarikan dananya adalah Rp. 99.641.509 untuk belanja pegawai, Rp. 82.074.376 untuk belanja barang dan Rp.0 untuk belanja modal.

Realisasi anggaran Loka POM di Kab. Pulau Morotai dari bulan Januari hingga bulan Maret Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 100.022.864 (11.59%) untuk belanja pegawai, Rp. 81.935.552 (3.23%) untuk belanja barang dan Rp. 0 (0%) untuk belanja modal.

Reliasasi anggaran bulan januari adalah Rp. 45.052.686 untuk belanja pegawai, Rp. 235.052.686 untuk belanja barang dan Rp. 0 untuk belanja modal. Pada bulan february adalah sebesar Rp.51.637.686 untuk belanja pegawai, Rp. 98.295.280 untuk belanja barang dan Rp. 0 untuk belanja modal. Sedangkan pada bulan september sebesar Rp. 118.008.979 untuk belanja pegawai, Rp. 200.468.006 untuk belanja barang dan Rp. 0 untuk belanja modal.

- b. Realisasi anggaran per Sasaran, yang meliputi:**

Sasaran Strategis untuk level BPOM;

	Sasaran Strategis		Nama Indikator	Volume			Anggaran per Sasaran Strategis		
				T	R	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

	B		C	D	E	F=(e/ dx100)	G	H	J=(h/g x100)
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	102.168.000	0	0
			Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	61,728,500	0	0
			Persentase Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	0	0	18,951,100	0	0
			Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	53,604.500	0	0
			Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	-	-	-	16,533,500	0	0

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025 LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

		yang ditindaklanjuti oleh stakeholder						
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan(diexcludkan dari perhitungan indikator dan NPSS)	90	0	0	21,423,600	0	0
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,5	0	0	40,566,400	0	0
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	63,430,400	0	0
		Persentase iklan sediaan farmasi dan	86,33	100	115,83	11,610,000	0	0

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

			pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan						
	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPTT		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	-	104,599,000	0	0
	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT		Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	-	-	142,699,000	0	0
			Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	0	0	99,410,00	0	0
			Jumlah desa pangan aman	5	0	0	171,938,000	0	0

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	0	0	116,245,000	0	0
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	10	200	25,590,000	0	0
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	5	0	0	111,985,000	0	0
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	39,141,000	0	0
	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	20,877,000	0	0

	Terwujudnya tata kelola pemerintah	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	122,140,000	0	0
	Unit Organisasi yang optimal							
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	2,046,031,000	280,834,336	13,73
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	
		Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	10	10	100	150,00,000	0	0

Tabel 77. Realisasi Anggaran Persasaran Strategis

Saran Program untuk Satker level Eselon I; dan Sasaran Kegiatan untuk Satker Pusat (Eselon II) dan UPT

1. JANUARI

	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (tidak termasuk AA)	Realisasi	Capaian (%)
	b	c	d	$e=(d/c \times 100)$	f	g	$h=(g/f \times 100)$
	AEA.001	14	1	7,14	39,141,000	0	0

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT						
BAH. 001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	3	1	33,33	20,877,000	0	0
BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0	142,000,000	0	0
BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	20	2	10	39,934,000	0	0
CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0	100,000,000	0	0
CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	5	0	0	50,000,000	0	0
PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	0	104,599,000	0	0
QCD.U63		1	0	0	111,985,000	0	0

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Di Loka POM Kabupaten Pulau Morotai						
	QDB.001 Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	0	0	99,410,000	0	0
	QDB.002 Desa Pangan Aman	1	0	0	171,938,000	0	0
	QDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	0	0	116,245,000	0	0
	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	158	10	6,33	102,765,000	0	0
	QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	3	1	33,33	29,590,000	0	0
	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	58	9	15,52	63,671,000	0	0
	QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang	75	8	10,67	140,150,000	0	0

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025 LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

	Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT						
QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	8	0	0	23,124,000	0	0
QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	65	5	7,69	168,071,000	0	0
EBA.956	Layanan BMN	1	0	0	8,000,000.00	0	0
EBA.994	Layanan Perkantoran	1	0	0	1,984,861,000	280,834,336	13,92

Tabel 78. Saran Program untuk Satker level Eselon I; dan Sasaran Kegiatan untuk Satker Pusat (Eselon II) dan UPT Januari

2. FEBRUARI

No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (tidak termasuk AA)	Realisasi	Capaian (%)
a	b	c	d	e=(d/cx100)	f	g	h=(g/fx100)
1	AEA.001	14	2	14,29	39,141,000	0	0

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT						
BAH. 001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	3	1	33,33	20,877,000	340,000	1,63
BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0	142,000,000	0	0
BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	20	4	20	39,934,000	4,602,800	11,53
CAB.001	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0	100,000,000	0	0
CAN.001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	5	0	0	50,000,000	0	0
PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	0	104,599,000	0	0
QCD.U63	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan	1	0	0	111,985,000	0	0

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

	Makanan Di Loka POM Kabupaten Pulau Morotai						
	QDB.001 Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	2	0	0	99,410,000	3,859,000	3,88
	QDB.002 Desa Pangan Aman	1	0	0	171,938,000	8,800,000	5,12
	QDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	0	0	116,245,000	5,148,000	4,43
	BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	158	10	6,33	102,765,000	2,584,000	2,51
	QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	3	1	33,33	29,590,000	2,500,000	8,45
	QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	58	10	17,24	63,671,000	3,841,000	6,03
	QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	75	12	16,00	140,150,000	5,726,000	4,09

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

QIC.001	8	2	25	23,124,000	2,420,000	10,47
Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT						
QIC.004	65	11	16,92	168,071,000	8,570,500	5,1
Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT						
EBA.956	1	0	0	8,000,000.00	0	0
Layanan BMN						
EBA.994	1	0	0	1,984,861,000	382,376,002	19,26
Layanan Perkantoran						

Tabel 79. Saran Program untuk Satker level Eselon I; dan Sasaran Kegiatan untuk Satker Pusat (Eselon II) dan UPT Februari

3. MARET

	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (tidak termasuk AA)	Realisasi	Capaian (%)
	b	c	d	e=(d/cx100)	f	g	h=(g/fx100)
AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	3	21,43	39,141,000	3,965,000	10,13

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

BAH.001	3	1	33,33	20,877,000	1,600,000	7,66
Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT						
BKB.001	1	0	0	142,000,000	0	0
Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan						
BMB.001	20	5	25	39,934,000	4,704,800	11,78
Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT						
CAB.001	1	0	0	100,000,000	0	0
Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia						
CAN.001	5	0	0	50,000,000	0	0
Perangkat pengolah data dan komunikasi						
PDD.001	1	0	0	104,599,000	563,300	0,54
Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice						
QCD.U63	1	0	0	111,985,000	2,420,000	2,16
Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Di Loka POM Kabupaten Pulau Morotai						

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

QDB.001	2	0	0	99,410,000	3,859,000	3,88
Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman						
QDB.002 Desa Pangan Aman	1	0	0	171,938,000	8,800,000	5,12
QDB.003 Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	0	0	116,245,000	5,148,000	4,43
BDC.001 Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	158	40	25,32	102,765,000	18,406,800	17,91
QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	3	1	33,33	29,590,000	5,337,700	18,04
QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	58	12	20,69	63,671,000	5,386,000	8,46
QIA.002 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	75	13	17,33	140,150,000	11,840,000	8,45
QIC.001	8	2	25	23,124,000	2,420,000	10,47

	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT						
	QIC.004	65	16	24,62	168,071,000	17,913,300	10,66
	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT						
	EBA.956	1	0	0	8,000,000.00	0	0
	Layanan BMN						
	EBA.994	1	0	0	2,018,171,000	520,361,818	25,78
	Layanan Perkantoran						

Tabel 80. Saran Program untuk Satker level Eselon I; dan Sasaran Kegiatan untuk Satker Pusat (Eselon II) dan UPT Januari

c. Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran.

Perhitungan atas efisiensi kinerja. Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\% \text{Capaian Output}}{\% \text{Capaian Input}} \quad IE \leq \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Efisiensi Kinerja

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi

daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut:

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE = SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE < SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Untuk dapat melihat pencapaian efisiensi kerja Loka POM di Kab. Pulau Morotai dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

No	Indikator	Output			Input Anggaran			IE	TE	Capaian Te
		Target s.d Bulan N (Bulan di tarik)	Realisasi s.d Bulan N (Bulan Ditarik)	%	Pagu	Realisasi s.d Bulan N	%			
1	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.33	99.71	115%	0	0	0%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	25.00	25	100%	184,160,000	184,156,059	100%	1	0	Efisien
3	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	41.00	45	110%	39,401,000	39,401,000	100%	1,1	0,1	Efisien
4	Nilai AKIP UPT BPOM			0%	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Jumlah desa pangan aman	15.00	0	0%	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	15.00	0	0%	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

7	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75.00	75.71	101%	17,912,000	17,900,196	100%	1,01	0,01	Efisien
8	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7.00	7.6	109%	64,339,000	64,228,184	100%	1,09	0,09	Efisien
9	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100.00	100	100%	162,762,000	161,380,020	99%	1,0101	0,0101	Efisien
10	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	15.00	0	0%	11,285,000	11,278,000	100%	0	-1	Tidak Efisien
11	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM			0%	2,037,432,000	2,018,925,179	99%	0	-1	Tidak Efisien
12	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.00		0%	36,885,000	35,510,000	96%	0	-1	Tidak Efisien
13	Persentase`` sampel KLB keracunan pangan	100.00	0	0%	61,239,000	61,232,020	100%	0	-1	Tidak Efisien

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

	yang diuji sesuai standar oleh UPT									
14	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	33.33	67%	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
15	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	15.00	0	0%	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
16	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	100	118%	125,877,000	125,870,020	100%	1,18	0,18	Efisien
17	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.50		0%	79,639,000	79,632,020	100%	0	-1	Tidak Efisien
18	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.44	85.29	100%	17,612,000	17,605,800	100%	1	0	Efisien
19	Indeks Pelayanan Publik UPT			0%	14,902,000	15,154,000	102%	0	-1	Tidak Efisien
20	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM			0%	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
21	Persentase sampel PIRT berisiko yang	75.00	90	120%	17,462,000	17,450,196	100%	1,2	0,2	Efisien

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

	ditindaklanjuti sesuai ketentuan									
22	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	83.33	104%	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Tabel 81. Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran

Tingkat Efisiensi Persasaran strategis

No.	Sasaran Strategis	Capaian (Output)	Anggaran (Input)	Tingkat Efisiensi	Kategori Efisiensi
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	73,14	10,63222222	5,879088724	Tidak Efisien
2	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPTT	108,57	0,54	200,0555556	Tidak Efisien
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	24,955	7,4075	2,368882889	Tidak Efisien
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	109,76	18,04	6,084257206	Tidak Efisien
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	0	2,16	-1	Tidak Efisien
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	66,66	10,13	5,580454097	Tidak Efisien
7	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	7,66	-	-

LAPORAN KINERJA INTERM TRIWULAN I TAHUN 2025

LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

8	Nilai AKIP UPT BPOM	-	0	-	-
9	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	25,68	-	-
10	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-
11	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100	0	-	-

Tabel 82. Tingkat Efisiensi Persasaran strategis

BAB IV

PENUTUP

Pada tahun 2025, secara garis besar pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dinilai dari 8 sasaran yang dibagi kedalam 22 indikator kegiatan yang ditetapkan. Pencapaian Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai pada triwulan I tahun 2025 antara lain sebagai berikut :

1. 8 (Delapan) Indikator Kegiatan dengan kategori Sangat Baik , yaitu:
 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 - Persentase sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai ketentuan
 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 - Persentase Keputusan/ Rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
 - Target pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
2. 1 (Satu) Indikator Kegiatan dengan kategori Baik
 - Implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT
3. 1 (Satu) Indikator Kegiatan dengan kategori Cukup
 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
4. 8 (Delapan) Indikator Kegiatan dengan kategori Kurang.
 - Persentase Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

- Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- Desa Pangan Aman
- Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
- Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
- Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

5. 3 (Tiga) Indikator kegiatan yang dinilai pada triwulan ke IV

- Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM
- Nilai AKIP UPT BPOM
- Indeks Pelayanan Publik UPT

Dalam menjaga sekaligus meningkatkan pencapaian indikator kinerja pada periode berikutnya, Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai berupaya melakukan upaya – upaya perbaikan dalam hal, antara lain :

- 1) Peningkatan pengawasan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan secara konvensional dan *online* agar produk yang beredar bisa memenuhi standar.
- 2) Peningkatan kreativitas dalam pemberian Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat dengan memperhatikan karakter dan kearifan lokal di Kabupaten Pulau Morotai untuk peningkatan nilai indeks.
- 3) Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi serta pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat.
- 5) Penguatan pengelolaan Sumber Daya berupa pengembangan kompetensi.
- 6) Intensifikasi pendampingan dan fasilitasi kepada pelaku usaha termasuk UMKM dalam rangka peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan.
- 7) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Selanjutnya diharapkan seluruh pegawai di Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai akan tetap memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kinerja masing-masing

individu sehingga capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai dapat terus meningkat pada periode berikutnya.

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Kode Indikator	Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai	Januari	8,00	88,89	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	60,00	#DIV/0!		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai	Februari	12,00	80,00	97,22	80,00	80,00	66,67	80,97	ila karena biaya pengadaa	sesuai dengan target tang
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai	Maret	13,00	80,00	100,00	100,00	83,33	100,00	95,83	ila karena biaya pengadaa	sesuai dengan target tang
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai	April		80,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai	Mei		80,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai	Juni		80,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai	Juli		80,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai	Agustus		80,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai	September		80,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai	Oktober		80,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai	November		80,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
		1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai	Desember		80,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

[illegible]

[illegible]

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	Januari	100,00	0,00	0,00	0,00
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	Februari	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	Maret	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	April		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	Mei		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	Juni		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	Juli		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	Agustus		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	September		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	Oktober		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	November		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawas	Desember		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang	% Pemenunanan Target Sarana	Jumlah Sarana yang Ditemukan yang Sesuai	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tidak Lampaui	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Pemenunanan Target Sarana	% Sardis PO
Persentase sarana distribusi: Januari		85	3	3	20,00	3	3	70,00	3	3	10,00	100,00
Persentase sarana distribusi: Februari		85	4	4	20,00	4	4	70,00	4	4	10,00	100,00
Persentase sarana distribusi: Maret		85	7	7	20,00	7	7	70,00	7	7	10,00	100,00
Persentase sarana distribusi: April					#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarana distribusi: Mei					#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarana distribusi: Juni					#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarana distribusi: Juli					#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarana distribusi: Agustus					#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarana distribusi: September					#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarana distribusi: Oktober					#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarana distribusi: November					#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase sarana distribusi: Desember					#DIV/0!			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SP dan PO
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan y: Januari		86.33	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan y: Februari		86.33	#DIV/0!	100,00	#DIV/0!	100,00	93,33	97,78
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan y: Maret		86.33	100,00	100,00	100,00	100,00	98,57	99,71
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan y: April		86.33	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan y: Mei		86.33	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan y: Juni		86.33	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan y: Juli		86.33	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan y: Agustus		86.33	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan y: September		86.33	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan y: Oktober		86.33	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan y: November		86.33	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan y: Desember		86.33	#DIV/0!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program	Sosialisasi Keamanan Pangan	Bimbingan teknis Keamanan Pangan	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang	Pengawasan	Realisasi
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Kea Januari		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Kea Februari		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Kea Maret		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Kea April		25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Kea Mei		70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Kea Juni		70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Kea Juli		82,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Kea Agustus		95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Kea September		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Kea Oktober		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Kea November		100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Kea Desember		13						100,00

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi	Pelatihan kader	Bimtek komunitas	Monev	Realisasi
Jumlah Desa Pangan Aman	Januari	5					0,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Februari	10	0,00				0,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	15	0,00	0,00			0,00
Jumlah Desa Pangan Aman	April	46	0,00	0,00			0,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Mei	48	0,00	0,00	0,00		0,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Juni	70	0,00	0,00	0,00		0,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Juli	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Agustus	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Desa Pangan Aman	September	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Oktober	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Desa Pangan Aman	November	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Desa Pangan Aman	Desember	1					300,00

Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunita: Januari		5	0,00				0,00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunita: Februari		10	0,00				0,00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunita: Maret		15	0,00	0,00	0,00		0,00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunita: April		23	0,00	0,00	0,00		0,00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunita: Mei		48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunita: Juni		70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunita: Juli		91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunita: Agustus		92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunita: September		93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunita: Oktober		94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunita: November		95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunita: Desember		1					300,00	3,00

Nama Indikator	Bulan	Target	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Januari		5	10,00	0,00	0,00	10,00	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Februari		10	40,00	0,00	0,00	40,00	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Maret		41	45,00	0,00	0,00	45,00	18,45
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh April		50	0,00	0,00	0,00		
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Mei		50	0,00	0,00	0,00		
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Juni		60	0,00	0,00	0,00		
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Juli		70	0,00	0,00	0,00		
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Agustus		80	0,00	0,00	0,00		
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh September		82	0,00	0,00	0,00		
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Oktober		84	0,00	0,00	0,00		
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh November		85	0,00	0,00	0,00		
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh Desember		91	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

Nama Indikator	Bulan	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	Nilai Realisasi SPDP	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	Nilai Realisasi Tahap I	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	Nilai Realisasi P21	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	Nilai Realisasi Tahap II	% Keberhasilan Perkara
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan 1 Januari		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan 1 Februari		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan 1 Maret		1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan 1 April					0	0	0	0	0	0	0	0			0	#DIV/0!
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan 1 Mei					0	0	0	0	0	0	0	0				#DIV/0!
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan 1 Juni					0	0	0	0	0	0	0	0				#DIV/0!
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan 1 Juli					0	0	0	0	0	0	0	0				#DIV/0!
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan 1 Agustus					0	0	0	0	0	0	0	0				#DIV/0!
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan 1 September					0	0	0	0	0	0	0	0				#DIV/0!
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan 1 Oktober					0	0	0	0	0	0	0	0				#DIV/0!
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan 1 November					0	0	0	0	0	0	0	0				#DIV/0!
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan 1 Desember					0	0	0	0	0	0	0	0				#DIV/0!



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SALMAN FARIESY

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pulau Morotai, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau
Morotai

SALMAN FARIESY

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI

TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.33 Persen
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.44 Persen
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Persen
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persen
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90 Persen
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.05 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	79.7 Persen
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.913 Nilai
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persen

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3,516,361,000 (Tiga Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,523,500,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1,992,861,000

Pulau Morotai, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau
Morotai


SALMAN FARIESY

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI


TARUNA IKRAR



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SALMAN FARIESY

Jabatan : Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pulau Morotai, 12 February 2025

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau
Morotai

SALMAN FARIESY

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI

TARUNA IKRAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LOKA POM DI KABUPATEN PULAU MOROTAI

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.33 Persen
2.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	11 Nilai
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85.44 Persen
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Nilai
		03 - Jumlah desa pangan aman	1 Persen
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persen
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	90 Persen
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.05 Nilai
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM	79.7 Persen
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.913 Nilai
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 Persen

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 3,516,361,000 (Tiga Miliar Lima Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,523,500,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	1,992,861,000

Pulau Morotai, 12 February 2025

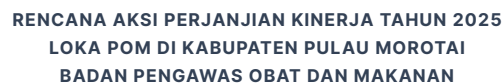
Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau
Morotai



SALMAN FARIESY

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan RI

TARUNA IKRAR

[illegible]

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	5	10	15	23	70	71	91	92	93	94	95	2	99,410,000
		03 - Jumlah desa pangan aman	5	10	15	46	48	70	91	92	93	94	95	1	171,938,000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	10	15	23	48	70	91	92	93	94	95	1	116,245,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	10	41	50	50	60	70	80	82	84	85	91	29,590,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	5	10	15	15	15	55	55	55	85	85	85	90	111,985,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	39,141,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.05	20,877,000
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	02 - Nilai AKIP UPT BPOM												79.7	20,020,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	1,992,861,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.913	9,940,000
		05 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	10	15	25	35	40	50	60	65	75	85	90	100	262,040,000
Total															3,516,361,000

Pulau Morotai, 16 April 2025

Kepala Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai



SALMAN FARIESY